

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1. Administrasi dan Geografis

a. Luas dan batas wilayah administrasi

Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri atas 2 pulau besar yaitu Lombok dan Sumbawa dan dikelilingi oleh 280 pulau-pulau kecil. Luas wilayah Provinsi NTB mencapai 49.312,19 Km² terdiri dari daratan seluas 20.153,15 Km² (40,87%) dan perairan laut seluas 29.159,04 Km² (59,13%) dengan panjang garis pantai 2.333 km. Luas Pulau Sumbawa mencapai 15.414,5 km² (76,49 %) dan luas Pulau Lombok seluas 4.738,70 Km² (23,51%).

b. Letak dan kondisi geografis

Secara geografis, Provinsi NTB terletak antara 115°46' - 119°5' Bujur Timur dan 8°10' - 9°5' Lintang Selatan dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Laut Jawa dan Laut Flores
- Sebelah Selatan : Samudra Hindia
- Sebelah Barat : Selat Lombok dan Provinsi Bali
- Sebelah Timur : Selat Sape dan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Secara Administratif Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari 8 kabupaten dan 2 kota dengan 116 wilayah kecamatan dan 1.146 desa/kelurahan. Kabupaten Sumbawa memiliki jumlah wilayah kecamatan terbanyak, yaitu 24 Kecamatan, sedangkan Kabupaten Lombok Timur memiliki wilayah administrasi desa/kelurahan terbanyak dengan 254 desa/kelurahan dengan jumlah kecamatan sebanyak 20 kecamatan, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.1
Jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Luas Wilayah
(s.d April 2013)

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Luas wilayah (Km ²)	Persentase (%)
1	Lombok Barat	10	122	1.053,92	5,23
2	Lombok Tengah	12	139	1.208,40	6,00

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Luas wilayah (Km ²)	Persentase (%)
3	Lombok Timur	20	254	1.605,55	7,97
4	Lombok Utara	5	33	809,53	4,02
5	Sumbawa	24	166	6,643,98	32,97
6	Dompu	8	81	2.324,60	11,53
7	Bima	18	198	4.389,40	21,78
8	Sumbawa Barat	8	65	1.849,02	9,17
9	Kota Mataram	6	50	61,30	0,30
10	Kota Bima	5	38	207,50	1,03
Jumlah		116	1.146	20.153,15	100

Sumber: NTB Dalam Angka 2013

c. Topografi

Topografi wilayah Provinsi NTB bervariasi dari 0-3.726 m dpl untuk Pulau Lombok, dan 0-2.755 m dpl untuk Pulau Sumbawa. Selong merupakan kota yang mempunyai ketinggian paling tinggi, yaitu 166 m dpl sementara Taliwang terendah dengan 11 m dpl. Kota Mataram sebagai tempat Ibukota Provinsi NTB memiliki ketinggian 27 m dpl.

Berdasarkan pada klasifikasi ketinggian wilayah maka diketahui bahwa wilayah yang memiliki ketinggian 0-100 m dpl sekitar 23,76% atau seluas 478,911 Ha, ketinggian 100-500 m dpl sekitar 37,39% atau seluas 753,612 Ha, ketinggian 500-1000 m dpl sekitar 15,25% atau seluas 307,259 Ha dan lebih dari 1000 m dpl seluas 475,533 Ha 23,60%. Dari tujuh gunung yang ada di Pulau Lombok, Gunung Rinjani merupakan tertinggi dengan ketinggian 3.726 m dpl, sedangkan Gunung Tambora merupakan gunung tertinggi di Sumbawa dengan ketinggian 2.851 m dpl dari sembilan gunung yang ada (NTB Dalam Angka 2013).

Kemiringan tanah didominasi oleh kemiringan tanah berkisar antara 15-40% seluas 704.619 Ha (34,96%) sedangkan yang paling sempit termasuk klasifikasi kemiringan tanah 0-2% seluas 338.552 Ha (16,80%). Untuk Pulau Lombok klasifikasi kemiringan yang paling luas berkisar antara 2-15% seluas 198.616 Ha (9,85%) sedangkan yang paling sempit klasifikasi kemiringan tanah lebih dari 40% seluas 20.175 Ha (1,01%). Sedangkan Pulau Sumbawa klasifikasi kemiringan tanah yang paling luas berkisar antara 15-40% seluas 573.903 Ha (28,48%) dan yang paling sempit kemiringan tanah 0-2% seluas 214.194 Ha (10,63%).

d. Geologi

Keadaan geologi wilayah NTB didominasi oleh batuan gunung api serta aluvium (resent). Batuan tertua berumur tersier sedangkan yang termuda berumur kuartar. Batuan tersier di Pulau Lombok terdiri dari perselingan batu pasir kuarsa, batu lempung, breksi, lava, tufa dengan lensa-lensa batu gamping, batu gamping, dan dasit. Batuan tersier di Pulau Sumbawa terdiri dari lava, breksi, tufa, andesit, batu pasir tufan, batu lempung, dasit, tonalit, tufa dasitan, batu gamping berlapis, batu gamping tufan, dan lempung tufan. Batuan kuartar di Pulau Lombok terdiri dari perselingan breksi gampingan dan lava, breksi, lava, tufa, batu apung, dan breksi lahar. Batuan kuartar di Pulau Sumbawa terdiri dari terumbu koral terangkat, epiklastik (konglomerat), hasil gunung api tanah merah, gunung api tua, gunung api Sangiang, gunungapi Tambora, gunung api muda dan batu gamping koral. Aluvium dan endapan pantai cukup luas terdapat di Pulau Sumbawa dan Lombok.

e. Hidrologi

DAS (Daerah Aliran Sungai)

Sesuai SK Gubernur NTB No. 147 Tahun 1999 tentang pembagian Sub Satuan Wilayah Sungai/Daerah Aliran Sungai di Satuan Wilayah Sungai Lombok dan Satuan Wilayah Sungai Sumbawa, wilayah NTB dibagi menjadi 18 Sub Satuan Wilayah Sungai/Daerah Aliran Sungai (SSWS/DAS). Satuan Wilayah Sungai (SWS) Lombok terdiri dari 4 (empat) SSWS meliputi, Dodokan, Menanga, Putih dan Jelateng. Sedangkan SWS Sumbawa terdiri dari 14 (empat belas) SSWS meliputi Jereweh, Rea, Rhee, Moyo Hulu, P. Moyo, Empang, Hoddo, Banggo, Parado, Sari, Rimba, Baka, Bako, dan Beh. Luas SWS dan SWSS di Provinsi NTB.

Cekungan Air Tanah

Inventarisasi cekungan air tanah di Provinsi NTB dapat sebagaimana dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.2
Inventarisasi Cekungan Air Tanah di Provinsi NTB

No	Cekungan Air Tanah (CAT)	Luas (km ²)	Air Tanah Bebas (juta m ³ / tahun)	Air Tanah Tertekan (juta m ³ / tahun)
1.	Mataram - Selong	2.366	662	8
2.	Tanjung - Sambelia	1.124	224	22

No	Cekungan Air Tanah (CAT)	Luas (km ²)	Air Tanah Bebas (juta m ³ / tahun)	Air Tanah Tertekan (juta m ³ / tahun)
3.	Sumbawa Besar	1.404	183	25
4.	Empang	345	35	3
5.	Pekat	977	220	10
6.	Sanggar – Kilo	1.419	320	14
7.	Dompu	375	63	6
8.	Bima	1.102	165	16
9.	Tawali – Sape	363	36	3

Sumber : Perda RTRW Provinsi NTB, 2009-2029

f. Klimatologi

Berdasarkan data Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), temperatur udara di Nusa Tenggara Barat pada tahun 2012 temperatur maksimum berkisar antara 29.9° C – 34.2° C dan temperature minimum antara 17.4° C – 22.6° C. Temperatur tertinggi terjadi pada bulan Oktober dan temperature terendah terjadi pada bulan Juni. Rata-rata kelembaban udara relatif tinggi, yaitu antara 77-85% ,kelembaban terendah terjadi pada bulan Agustus sedangkan tertinggi terjadi pada bulan Januari dengan kecepatan angin rata-rata mencapai kisaran 4 – 7 knots dan kecepatan angin maksimum mencapai 26 knots yang terjadi pada bulan Maret dan kecepatan angin terendah 15 knots terjadi pada bulan November dan Desember. Tekanan udara berkisar 1001.6 – 1008.1 mb, tekanan udara terbesar terjadi pada bulan September dan terendah terjadi pada bulan Januari. Lamanya penyinaran matahari berkisar 37-88 %, lamanya penyinaran matahari terbesar terjadi pada bulan Agustus dan terendah terjadi pada bulan Januari. Jumlah hari hujan terendah yaitu 0 hari pada bulan Agustus dan September dan yang terbanyak adalah pada bulan Desember dengan jumlah 27 hari.

g. Penggunaan lahan

Penggunaan lahan yang terluas adalah hutan seluas 1.163.941,51 Ha (57,75 %) dan persawahan seluas 240.925,05 ha (11,95 %). Sedangkan penggunaan lahan yang terkecil adalah pertambangan seluas 591,96 Ha (0,03%). Lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3
Luas Penggunaan Lahan di Provinsi NTB Tahun 2011

No.	Penggunaan Lahan	Kabupaten/Kota (Ha)										Provinsi (Ha)
		Mataram	Lombok Barat	Lombok Tengah	Lombok Timur	Lombok Utara	Sumbawa	Sumbawa Barat	Dompus	Bima	Kota Bima	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Permukiman	3.263,93	5.197,58	6.185,29	7.176,42	2.002,46	4.150,69	1.374,47	2.502,39	3.097,83	817,39	35.768,44
2	Industri	843,53	-	-								843,53
3	Pertambangan				80,56		50,34	461,06				591,96
4	Persawahan	1.881,56	16.421,46	64.354,66	51.602,89	6.041,74	46.102,83	9.000,27	14.482,29	27.337,80	3.699,54	240.925,05
5	Pert. Tanah Kering semusim		22.845,42	10.100,78	26.956,69	3.240,45	76.666,40	6.828,59	12.928,66	40.144,78	10.205,09	209.916,85
6	Kebun		10.542,49	13.570,95	11.369,90	27.388,02	13.856,10	1.942,89	4.802,92	420,70	466,81	84.360,78
7	Perkebunan					4.840,91	493,15	5,20	8.901,78	2603,54	668,52	17.513,10
8	Padang		9.072,13	4.686,40	10.120,31	1.668,58	75.507,10	8.252,56	41.337,83	74.517,69	382,14	225.544,73
9	Hutan		29.173,47	19.660,45	51.584,33	34.350,55	438.440,21	155.125,44	143.761,26	287.461,02	4.384,79	1.163.941,51
10	Perairan Darat	94,43	1.009,29	2.281,47	1.177,60	1.065,86	4.935,77	1.616,85	2.689,74	1.817,67	78,30	16.766,99
11	Tanah Terbuka	46,45	305,16		482,96	213,88	4.195,63	294,65	21,75	998,37		6.558,86
12	Lain-lain		10.820,00		3,23	141,00			1.031,38	540,60	47,43	12.583,64
PROVINSI NTB		6.129,91	105.387,00	120.840,00	160.554,87	80.953,45	664.398,23	184.901,99	232.460,00	438.940,00	20.750,00	2.015.315,45

Sumber : Kanwil BPN Provinsi NTB, 2012

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Kawasan Strategis Provinsi berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2009-2029 dari kepentingan pertumbuhan ekonomi, yaitu :

1. Mataram Metro meliputi Kota Mataram, Kecamatan Batulayar, Kecamatan Gunung Sari, Kecamatan Lingsar, Kecamatan Narmada, Kecamatan Labuapi dan Kecamatan Kediri dengan sektor unggulan perdagangan, jasa, industri dan pariwisata;
2. Senggigi-Tiga Gili (Air, Meno dan Trawangan) dan sekitarnya di Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara dengan sektor unggulan pariwisata, industri dan perikanan;
3. Agropolitan Rasimas di Kabupaten Lombok Timur dengan sektor unggulan pertanian, industri dan pariwisata;
4. Kute dan sekitarnya di Kabupaten Lombok Tengah, sebagian wilayah Kabupaten Lombok Barat dan sebagian wilayah Kabupaten Lombok Timur dengan sektor unggulan pariwisata, industri dan perikanan;
5. Agroindustri Pototano berada di Kabupaten Sumbawa Barat dengan sektor unggulan pertanian dan industri;

6. Agropolitan Alas Utan berada di Kabupaten Sumbawa dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan pariwisata;
7. Lingkar Tambang Batu Hijau dan Dodo Rinti berada di Kabupaten Sumbawa Barat dan Sumbawa dengan sektor unggulan pertambangan, pertanian dan pariwisata;
8. Teluk Saleh dan sekitarnya berada di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Dompu masing-masing beserta wilayah perairannya dengan sektor unggulan perikanan, pariwisata, pertanian, peternakan dan industri;
9. Agropolitan Manggalewa berada di Kabupaten Dompu dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan dan industri;
10. Hu'u dan sekitarnya berada di Kabupaten Dompu dengan sektor unggulan pariwisata, industri, pertanian dan perikanan;
11. Teluk Bima dan sekitarnya berada di Kabupaten Bima dan Kota Bima dengan sektor unggulan perikanan, pariwisata dan industri;
12. Waworada-Sape dan sekitarnya berada di Kabupaten Bima dengan sektor unggulan perikanan, pariwisata dan industri.

Kawasan strategis dari kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi :

1. Kawasan ekosistem Puncak Ngengas Selalu Legini berada di Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa;
2. Kawasan ekosistem Gunung Tambora berada di Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima;
3. Kawasan ekosistem Hutan Parado berada di Kabupaten Dompu dan Bima;
4. Kawasan ekosistem Pulau Sangiang berada di Kabupaten Bima.

Rencana Pembagian Zona Wilayah Pesisir dan Laut

Sesuai kebijaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, wilayah pesisir dan laut Provinsi NTB dikelompokkan ke dalam 18 (delapan belas) kawasan pengembangan, yaitu :

1. Kawasan Gili Indah dan sekitarnya;
2. Kawasan Senggigi dan sekitarnya;
3. Kawasan Labuan Lembar dan sekitarnya;
4. Kawasan Gili Gede dan sekitarnya;
5. Kawasan Teluk Sepi dan sekitarnya;

6. Kawasan Kuta dan sekitarnya;
7. Kawasan Teluk Ekas dan Teluk Serewe dan sekitarnya;
8. Kawasan Tanjung Luar dan sekitarnya;
9. Kawasan Labuan Lombok dan sekitarnya;
10. Kawasan Gili Sulat dan sekitarnya;
11. Kawasan Maluk dan sekitarnya;
12. Kawasan Pantura Kabupaten Sumbawa dan sekitarnya;
13. Kawasan Teluk Saleh dan sekitarnya;
14. Kawasan Teluk Sanggar dan sekitarnya;
15. Kawasan Teluk Cempi dan sekitarnya;
16. Kawasan Teluk Bima dan Sekitarnya;
17. Kawasan Sape dan sekitarnya;
18. Kawasan Teluk Waworada dan sekitarnya.

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Wilayah Rawan Bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Jenis dan Lokasi Kawasan Rawan Bencana

a. Kawasan Rawan Tanah Longsor

Lokasi	Kawasan Rawan Tanah Longsor
Rawan Tanah Longsor Tipe A	
Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Utara	Kawasan sekitar Rinjani, Malimbu dan Sekotong
Kabupaten Lombok Tengah	Kawasan sekitar Rinjani bagian selatan
Kabupaten Lombok Timur	Kawasan sekitar Rinjani bagian timur dan sekitar Gunung Nangi
Kabupaten Sumbawa Barat	Kawasan sekitar Taliwang, Seteluk, Jereweh, Maluk dan Punik
Kabupaten Sumbawa	Kawasan sekitar Alas, Semongkat, Lenangguar dan Empang
Kabupaten Dompu	Kawasan Sekitar Tambora, Ranggo dan Paradowane
Kab dan Kota Bima	Kawasan sekitar Tambora Bagian timur, Bima dan Karumbu
Rawan Tanah Longsor Tipe B	
Kabupaten Lombok Barat	Kawasan Sekitar Rinjani, Malimbu, Lembar dan Sekotong
Kabupaten Lombok Tengah	Kawasan sekitar Rinjani bagian selatan dan sekitar Kuta
Kabupaten Lombok Timur	Kawasan Sekitar Rinjani bagian timur dan sekitar Gunung Nangi

Kabupaten Dompu	Kawasan sekitar Tambora bagian barat
Kabupaten Bima	Kawasan sekitar Tambora bagian timur dan sekitar Gunung Kuta

Sumber : RTRW Provinsi NTB

b. Kawasan Rawan Bencana Gunung Berapi

Lokasi	Kawasan Rawan Gunung Berapi
Gunung Rinjani	
Kabupaten Lombok Utara	Daerah Bahaya : Kecamatan Bayan dan Kampung Batusantek (sepanjang alur sungai Kokok Putih)
Kabupaten Lombok Timur	Daerah Bahaya : Kecamatan Aikmel, Sambelia, dan sepanjang alur Kokok Putih
Gunung Tambora	
Kabupaten Dompu	Daerah Bahaya : Daerah di sekitar kaldera dengan luas kurang lebih 58,7 km ²
Kota Bima	Daerah Waspada : jalur sepanjang sungai Ngguwu kara, sungai Ngguwu Tula (ketiganya termasuk Desa Beringin Jaya) dan Sungai Hodo (Desa Kesi)
Kabupaten Bima	Daerah Waspada : jalur sepanjang sungai Oi Marai dan sungai Mango (Desa Kawinda Toi), sungai Panihi (Desa Kawinda Nae), dan sungai Sumba (Desa Labuhan Kenanga)
Gunung Api Sangiang	
Kabupaten Bima	Daerah terlarang : daerah yang termasuk dalam lingkaran dengan jari-jari kurang lebih 5,0 Km ² yang berpusat di Puncak Doro Api yang diperluas sepanjang alur sungai kering Oi Sola, Oi sori Buntu, Sori Belanda, Sori Mbere, Sori Do Japa, Sori Panda, Sori Iso dan Sori Berano
	Daerah Bahaya I : hampir seluruh daratan pulau Sangiang termasuk dalam daerah ini, kecuali kampung Toro Panda yang berada di bagian selatan
	Daerah Bahaya II : daerah di sekeliling pantai pulau Sangiang

Sumber : RTRW Provinsi NTB

c. Kawasan Rawan Banjir

Lokasi	Kawasan Rawan Banjir
Kota Mataram	Daerah Ampenan Utara, Kopajali, Sekitar Kekalik, Sungai Meninting, Sungai Midang, Sungai Ancar, Sungai Unus dan Sungai Jangkok
Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Utara	Daerah Empol (Sekotong Tengah), Bayan, Gangga-Lempenge, sepanjang sungai Penggolong Rempek dan Anyar, Sungai Bentek, Menggala (Pemenang), Berora, Gerung dan Jembatan Kembar
Kabupaten Lombok Tengah	Daerah di sepanjang aliran sungai yang terdapat di seluruh

	wilayah Kabupaten Lombok Tengah
Kabupaten Lombok Timur	Daerah di sepanjang aliran sungai yang terdapat di seluruh wilayah Kabupaten Lombok Timur
Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat	Sepanjang Brang Moyo di daerah Poto Tengke Moyo Hilir, Brang Beh di Lunyuk, Brang Rea di Taliwang, Brang Benete di Jereweh, Brang Labuhan Mapin di Alas, Brang Utan di Utan Rhee, Brang Muir di Plampang, Empang, Moyo Hulu, Ropang dan Lape Lopok
Kabupaten Dompu	Daerah di sepanjang aliran sungai yang terdapat di Kabupaten Dompu
Kota Bima	Daerah di sepanjang pantai di Kota Raba, khususnya yang dekat dengan lembah sungai
Kabupaten Bima	Daerah di sepanjang aliran sungai di Sori Wawo Maria, daerah Sape dan sekitarnya, Karumbu, Lambu, Ntoke-Tawali, Wera, Jatiwangi, dan daerah sekitar aliran sungai lainnya di wilayah Kabupaten Bima

Sumber : RTRW Provinsi NTB

d. Kawasan Rawan Tsunami

Lokasi	Kawasan Rawan Tanah Longsor
Kabupaten Lombok Barat	Kawasan Pesisir bagian selatan Kabupaten Lombok Barat
Kabupaten Lombok Tengah	Kawasan pesisir bagian selatan Kabupaten Lombok Tengah yaitu Selong Belanak, Kuta, Tanjung Aan, Gerupuk dan Teluk Awang
Kabupaten Lombok Timur	Kawasan pesisir selatan Kabupaten Lombok Timur yaitu Ekas, Tanjung Ringgit, Tanjung Luar, Labuhan Haji
Kabupaten Sumbawa Barat	Kawasan pesisir bagian barat dan selatan yaitu Maluk, Benete, Tongo, Sejongong dan Sekongkang
Kabupaten Sumbawa	Kawasan pesisir bagian utara dan selatan yaitu Alas, Utan, Badas, Sumbawa Besar, Prajak, Labuhan Moyo Hilir, Empang dan Plampang bagian selatan, Lunyuk dan Teluk Panas, Plampang
Kabupaten Dompu	Kawasan pesisir bagian barat dan selatan Kabupaten Dompu, yakni Calabai, Nangamiro dan Kilo, serta pantai Hu'u di pesisir bagian selatan
Kota Bima	Pantai bagian barat Kota Bima
Kabupaten Bima	Kawasan pesisir bagian timur dan selatan Kabupaten Bima, yakni Sape dan Lambu, Karumbu dan daerah sekitarnya

Sumber : RTRW Provinsi NTB

e. Kawasan Rawan Angin Topan

Lokasi	Kawasan Rawan Tanah Longsor
Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Utara	Kecamatan Gerung dsk, Sekotong Tengah, Darmada dsk, dan Bayan dsk
Kabupaten Lombok Timur	Kecamatan Keruak dsk, Jerowaru dsk dan Sambelia dsk

Kabupaten Sumbawa Barat	Kecamatan Brang Rea dsk
Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Alas dsk, Unter Iwes dsk, Empang-Tarano dsk
Kabupaten Dompu	Hampir seluruh wilayah di Kabupaten Dompu
Kabupaten Bima	Kecamatan Woha dsk, monta dsk, Woja dsk

Sumber : RTRW Provinsi NTB

f. Kawasan Rawan Gelombang Pasang

Lokasi	Kawasan Rawan Gelombang Pasang
Kota Mataram	Sepanjang pesisir bagaian barat yaitu Sekip dan Ampenan
Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Utara	Sepanjang Pesisir Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Utara
Kabupaten Lombok Tengah	Pantai bagian selatan Kabupaten Lombok Tengah yaitu Selong Belanak, Kuta Tanjung Aan, Gerupuk dan Pantai Awang
Kabupaten Lombok Timur	Pantai selatan dan timur Kabupaten Lombok Timur yaitu Ekas, Tanjung Ringgit, Tanjung Luar, Labuhan Haji, Labuhan Lombok
Kabupaten Sumbawa Barat	Pantai bagian barat dan selatan yaitu Maluku, Benete, Tongo, Sejongong dan Sekongkong
Kabupaten Sumbawa	Pantai bagian utara dan selatan yaitu Alas, Utan, Badas, Sumbawa Besar, Prajak, Labuhan Moyo Hilir, Empang dan Plampang bagian selatan, Lunyuk dan Teluk Panas, Plampang
Kabupaten Dompu	Pantai bagian barat Kabupaten Dompu, yakni Calabai, Nangamiro dan Kilo, serta Pantai Hu'u di pesisir bagian selatan
Kota Bima	Pantai bagian barat Kota Bima
Kabupaten Bima	Pantai bagian utara dan timur Kabupaten Bima, yakni Donggo dsk, Sape dan Lambu, Wera, Karumbu dan daerah sekitarnya

Sumber : RTRW Provinsi NTB

g. Kawasan Rawan Kekeringan

Lokasi	Kawasan Rawan Kekeringan
Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Utara	Kecamatan Lembar, Sekotong dan sekitarnya, Kedondong, Malimbu, Pemenang dan sekitarnya, Tanjung, Liuk-Kayangan-Selengen-Bayan, dan Medas
Kabupaten Lombok Tengah	Praya Barat, Praya Timur, Pujut, Praya Tengah, Janapria dan Praya Barat Daya
Kabupaten Lombok Timur	Keruak-Jerowaru-Sakra-Sakra Barat-Sakra Timur-Sikur, Labuhan Haji, Pringgabaya, Kecamatan Sambelia dan sekitarnya
Kabupaten Sumbawa Barat	Sejongong, Maluku, Jereweh-Endeh-Bertong-Taliwang-Tepas-Seteluk-Labuhan Sepakeh

Kabupaten Sumbawa	Lunyuk Besar-Kopo-Batu Lanteh-Baturotok-Punik, Alas-Penyengar-Utan-Potopedu-Rhee Loka, Lenangguar-Semongkat, Pototano-Labuhan-Serading-Batubulan-Lopok-Lape-kalaning-Tanjungberu-Pungkit, Plampang-Empang
Kabupaten Dompu	Kempo, Hu'u, Kilo dan Mbawi
Kabupaten dan Kota Bima	Sila, Paradowane, Bima dan Sekitarnya, Tawali, Sape, dan P.Sangiang

Sumber : RTRW Provinsi NTB

h. Kawasan Rawan Abrasi Pantai

Lokasi	Kawasan Rawan Abrasi Pantai
Tersebar di wilayah pesisir di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa	

Sumber : RTRW Provinsi NTB

i. Kawasan Rawan Gempa Bumi

Lokasi	Kawasan Rawan Gempa Bumi
Tersebar di wilayah di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa yaitu daerah/kawasan yang berpotensi dan/atau yang pernah mengalami gempa skala VII s.d XII MMI (modified mercally intensity)	

Sumber : RTRW Provinsi NTB

2.1.4. Demografi

a. Jumlah penduduk

Berdasarkan data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2012, jumlah penduduk Nusa Tenggara Barat mencapai 4.587.562 jiwa. Dengan rincian, laki-laki sebanyak 2.228.493 jiwa dan perempuan sebanyak 2.359.069 jiwa, dengan rasio jenis kelamin sebesar 94,46. Jumlah penduduk NTB tahun 2012 sebanyak 4.587.562 orang meningkat sebesar 3,03% atau 41.912 orang dibandingkan dengan penduduk tahun 2011. Jumlah penduduk terbesar terdapat di Kabupaten Lombok Timur dan yang terkecil berada di Kabupaten Sumbawa Barat.

Tabel 2.5

Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kabupaten/Kota 2012
Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional

No	Kabupaten/Kota	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Rasio JK
1	Lombok Barat	300.364	312.797	613.161	96,03
2	Lombok Tengah	414.602	460.629	875.231	90,01
3	Lombok Timur	524.126	599.362	1.123.488	87,45
4	Sumbawa	216.066	206.963	423.023	104,40

No	Kabupaten/Kota	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Rasio JK
5	Dompu	113.164	110.514	223.678	102,40
6	Bima	222.883	224.403	447.286	99,32
7	Sumbawa Barat	60.201	58.407	118.608	103,07
8	Lombok Utara	100.500	103.064	203.564	97,51
9	Kota Mataram	204.676	208.534	413.210	98,15
10	Kota Bima	71.911	74.396	146.307	96,66
	Jumlah/Total	2.228.493	2.359.069	4.587.562	94,46

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (NTB Dalam Angka 2013)

b. Pertumbuhan penduduk

Penduduk Nusa Tenggara Barat terdistribusi tidak merata, karena 70,4% (3.228.654 jiwa) berdomisili di Pulau Lombok dan selebihnya 29,6% (1.358.908 jiwa). Lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.6
Penyebaran Penduduk Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2008-2012 (jiwa)

No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk (jiwa)				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Lombok Barat	816.523	829.777	599.986	606.044	613.161
2	Lombok Utara	-	-	200.072	202.092	203.564
3	Lombok Tengah	844.105	856.675	860.209	868.895	875.231
4	Lombok Timur	1.068.486	1.080.237	1.105.582	1.116.745	1.123.488
5	Kota Mataram	362.243	375.506	402.843	406.910	413.210
	Pulau Lombok	3.091.357	3.142.195	3.168.692	3.200.686	3.228.654
6	Sumbawa Barat	99.056	101.089	114.951	116.112	118.608
7	Sumbawa	413.869	420.750	415.789	419.987	423.029
8	Dompu	213.185	217.479	218.973	221.184	223.678
9	Bima	416.446	420.207	439.228	443.663	447.286
10	Kota Bima	129.843	132.292	142.579	144.018	146.307
	Pulau Sumbawa	1.272.399	1.291.817	1.331.520	1.344.964	1.358.908
	Provinsi NTB	4.363.756	4.434.012	4.500.212	4.545.650	4.587.562

Sumber : BPS NTB, 2012 (NTB Dalam Angka 2013)

Penduduk Nusa Tenggara Barat Tahun 2008-2012 mengalami peningkatan disebabkan oleh kelahiran alami dan migrasi penduduk. Rata-rata pertumbuhan penduduk per tahun sebesar 1,70%. Proporsi jumlah penduduk perempuan terhadap penduduk laki-laki atau sex ratio rata-rata mencapai 93,14. Artinya bahwa 100 orang penduduk perempuan, penduduk laki-laki sejumlah 93 orang. Adapun pertumbuhan penduduk berdasarkan jenis kelamin di Provinsi Nusa Tenggara Barat menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak

dibanding penduduk laki-laki dengan sex ratio pada tahun 2012 mencapai 94,46 yang berarti dari 100 orang penduduk perempuan terdapat 94,46 penduduk laki-laki. Kepadatan Penduduk menunjukkan bahwa Kota Mataram memiliki tingkat kepadatan penduduk tertinggi, sedangkan Kabupaten Sumbawa Barat memiliki kepadatan penduduk terendah. Lebih jelas lihat tabel berikut.

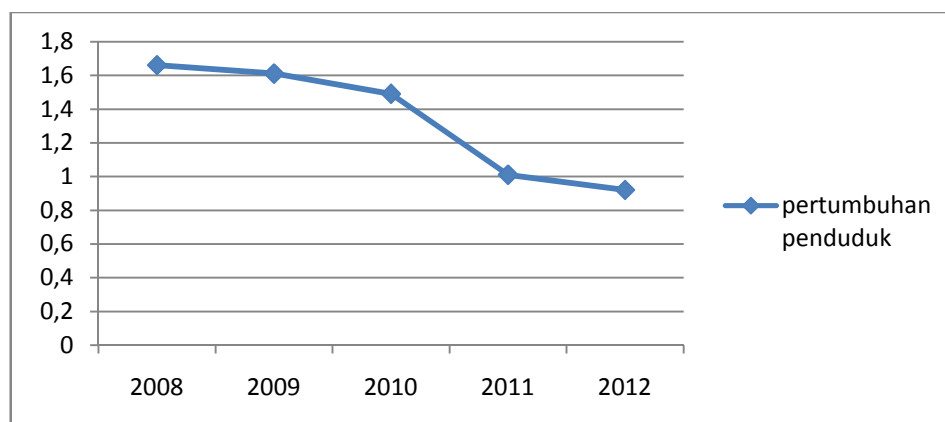
Tabel 2.7
Kepadatan Penduduk Tahun 2008-2012

No.	Kabupaten/ Kota	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Lombok Barat	434.19	445,30	569,29	575,04	582
2	Lombok Utara	-	-	247,15	249,64	251
3	Lombok Tengah	698.53	708,93	711,88	719,05	724
4	Lombok Timur	665.50	672,81	688,60	695,55	700
5	Kota Mataram	5.909,35	6.125,71	6.571,66	6.638,01	6.741
Pulau Lombok		652.36	663,09	668,69	675,44	681
6	Sumbawa Barat	53.57	54,67	62,17	62,80	64
7	Sumbawa	62.29	63,33	62,58	63,21	64
8	Dompu	91.78	93,56	94,20	95,15	96
9	Bima	94.88	95,73	100,07	101,08	102
10	Kota Bima	625.75	637,55	687,13	694,13	705
Pulau Sumbawa		82.55	83,80	86,38	87,25	88
Provinsi NTB		216.53	220,02	223,30	225,56	228

Sumber: Data BPS Tahun 2012

Pertumbuhan penduduk tahun 2008 – 2012 terlihat dalam grafik berikut:

Gambar 2.2
Pertumbuhan Penduduk Nusa Tenggara Barat tahun 2008 - 2012 (%)



Berdasarkan grafik diatas pertumbuhan penduduk Provinsi NTB mengalami penurunan dari 1,66% pada tahun 2008, menurun pada tahun 2012 menjadi

0,92%. Hal ini mengindikasikan bahwa selama kurun waktu tersebut program pemerintah mengendalikan pertumbuhan penduduk dengan berbagai paket kebijakan telah dapat direspon positif oleh masyarakat salah satunya adalah menjadi peserta KB aktif atau dengan kesadaran sendiri mengatur jarak kelahiran maupun membatasi jumlah anak.

c. Struktur dan komposisi penduduk

Menurut kelompok umur, komposisi penduduk terbanyak pada umur 0-4 tahun yaitu sebanyak 485.171 jiwa, sedangkan penduduk terkecil pada kelompok umur 60-64 tahun sebanyak 122.048. Secara keseluruhan penduduk yang produktif atau kelompok umur 15-64 tahun sebanyak 64,45%. Sampai saat ini, jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari penduduk laki-laki. sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.8
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2012

Kelompok umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	249.049	236.122	485.171
5-9	240.696	228.204	468.900
10-14	237.417	225.419	462.836
15-19	219.129	216.251	435.380
20-24	180.825	211.291	392.116
25-29	183.099	221.393	404.492
30-34	168.309	197.901	366.210
35-39	161.534	182.123	343.657
40-44	138.026	153.336	291.362
45-49	116.058	126.111	242.169
50-54	101.791	109.457	211.248
55-59	73.784	74.186	147.970
60-64	59.525	62.523	122.048
65+	99.251	114.752	214.003
Jumlah/Total	2.228.493	2.359.069	4.587.562

Sumber : NTB Dalam Angka 2013

Berdasarkan rasio penduduk menurut jenis pendidikan menunjukkan bahwa penduduk perempuan memiliki rasio terbanyak pada jenjang pendidikan SD sebesar 33,4% di Kota Bima dan ratio terendah pada jenjang akademi sebesar 1,1% di Kabupaten Lombok Utara. Demikian pula halnya dengan

rasio terbesar untuk penduduk laki-laki berada pada jenjang SMA sebesar 37,1% di kota Bima dan terendah pada jenjang akademi sebesar 0,9% di Kabupaten Lombok Utara, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.9
Rasio Penduduk berdasarkan jenis pendidikan

No	Kabupaten/Kota	Tdk/Blm Pernah Sekolah (%)		Tdk/Blm Tamat SD (%)		SD/MI (%)		SMP (%)		SMA (%)		Akademi/Diploma (%)		Universitas (%)	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Kota Mataram	2.7	9.5	15.0	16.3	17.0	18.2	17.1	19.7	34.5	23.3	2.9	4.0	10.7	8.8
2	Kabupaten Lombok Barat	13.0	23.5	27.0	22.3	27.4	27.6	12.0	12.9	15.5	9.4	1.0	1.7	4.2	2.7
3	Kabupaten Lombok Tengah	14.0	23.9	22.2	21.2	25.9	26.1	15.0	16.2	17.8	9.1	1.3	2.4	3.8	2.4
4	Kabupaten Lombok Timur	7.2	15.5	27.2	19.7	27.5	31.5	15.8	18.5	15.5	12.0	1.4	1.9	5.3	1.9
5	Kabupaten Lombok Utara	15.0	24.9	27.4	24.9	26.1	26.8	14.5	13.2	13.3	7.8	0.9	1.1	2.9	1.3
6	Kabupaten Sumbawa Barat	2.4	7.4	23.7	24.0	28.2	28.0	15.5	16.1	23.9	19.6	1.0	2.8	5.2	3.2
7	Kabupaten Sumbawa	3.5	8.2	21.2	21.9	29.5	31.7	18.9	19.4	21.9	13.9	0.9	1.7	4.2	3.1
8	Kabupaten Dompu	4.6	9.5	26.9	24.9	21.5	23.8	16.5	15.9	24.6	20.0	1.6	2.4	4.4	3.5
9	Kabupaten Bima	4.7	7.0	26.2	27.4	24.1	25.9	17.7	16.3	22.4	17.6	0.7	1.6	4.2	4.3
10	Kota Bima	1.5	3.2	14.6	17.8	18.7	19.3	14.3	15.2	37.1	33.4	2.3	2.0	11.5	11.2

Sumber : Hasil Analisis

Angka beban tanggungan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dikelompokkan menurut sex ratio antara laki-laki dengan perempuan, dimana rasio beban tanggungan pada tahun 2012 menurun 0,01 dibanding rasio yang sama pada tahun 2011, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.10
Angka Beban Tanggungan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011-2012

No.	Kelompok Umur/Th	Jumlah Penduduk 2011			Jumlah Penduduk 2012		
		Laki	Perempuan	Total	Laki	Perempuan	Total
1.	0-14	720.254	683.796	1.404.050	727.162	689.745	1.416.907
2.	15-64	1.383.437	1.541.069	2.924.506	1.402.080	1.554.572	2.956.652
3.	65+	98.325	113.769	212.094	99.251	114.752	214.003
Dependency Ratio		58,96	51,75	55,17	58,94	51,75	55,16

Sumber: NTB Dalam Angka 2013

Selama kurun waktu tahun 2008- 2012 jumlah penduduk usia kerja (umur 15-64 tahun) mengalami peningkatan. Peningkatan penduduk usia kerja ini menunjukkan semakin banyaknya tuntutan lapangan kerja yang harus ada untuk menampung pertambahan usia produktif tersebut, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.11
Penduduk Yang Berusia 15 tahun ke atas Tahun 2008 – 2012

No.	Uraian	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012*
1.	Penduduk ≥15 thn	2.988.548	3.048.762	3.098.418	3.136.600	3.163.692
2.	Laki-laki (%)	1.396.781 (46.74)	1.426.407 (46.79)	1.464.623 (47.27)	1.481.762 (47,24)	1.501.331 (47,35)
3.	Perempuan (%)	1.591.767 (53.26)	1.622.355 (53.21)	1.633.795 (52.73)	1.654.838 (52,76)	1.669.324 (52,64)
Pertumbuhan (%)		1.78	2.06	10.48	1.23	1.71

Sumber : LKPJ AMJ 2008-2013 dan *NTB Dalam Angka 2013 diolah

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

a. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Perekonomian Provinsi NTB masih didominasi oleh sektor primer yakni sektor pertanian dan pertambangan. Kontribusi sektor pertanian mencapai 25,69%, sedangkan kontribusi sektor pertambangan mencapai 18,63%. Peran sektor sekunder seperti industri pengolahan masih relatif kecil. Kontribusi industri pengolahan terhadap perekonomian sebesar 3,91%. Dilihat dari penggunaan PDRB yang tercipta di Provinsi NTB, 54,22% digunakan untuk konsumsi masyarakat dan 31,03% digunakan untuk kegiatan investasi. Investasi sangat dibutuhkan oleh suatu daerah untuk meningkatkan perekonomiannya. PDRB atas dasar harga konstan dengan tahun dasar 2000 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun meski pada 2 tahun terakhir ada penurunan.

Tabel 2.12
PDRB Provinsi NTB
Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2008-2012
(Termasuk Sub Sektor Pertambangan Non Migas)

No	Sektor	2008 (juta)	2009 (juta)	2010 (juta)	2011 (juta)	2012 (juta)**
1.	Pertanian	4.332.526,55	4.485.770,59	4.545.381,41	4.726.670,01	4.947.018,94
2.	Pertambangan dan	3.811.549,41	4.905.867,64	5.491.111,43	4.032.039,98	2.957.714,32

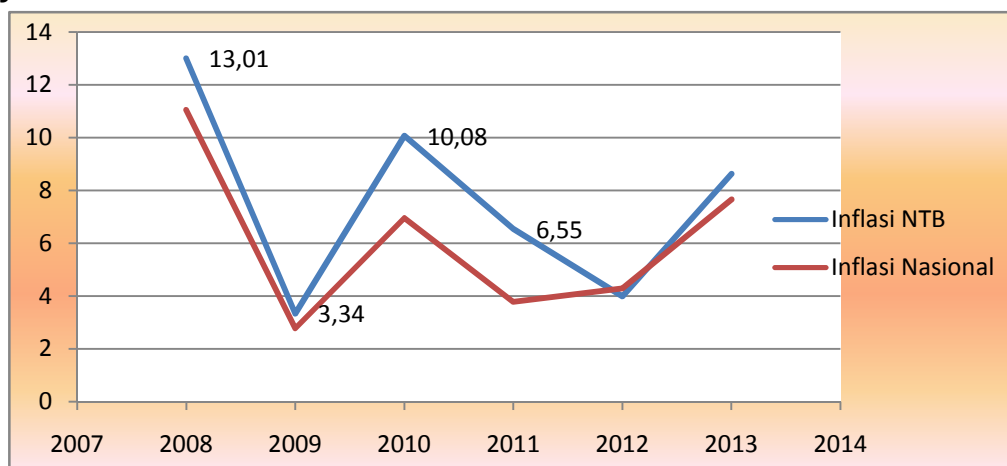
No	Sektor	2008 (juta)	2009 (juta)	2010 (juta)	2011 (juta)	2012 (juta)**
	Penggalian					
3.	Industri Pengolahan	836.930,30	909.946,10	944.253,01	973.767,67	1.012.100,30
4.	Listrik , Gas Air bersih	61.117,67	66.761,96	71.708,97	77.624,22	83.379,77
5.	Bangunan	1.248.862,44	1.457.949,74	1.508.183,93	1.622.882,85	1.699.647,21
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	2.543.292,48	2.750.196,78	2.939.495,36	3.151.923,44	3.444.864,40
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	1.332.551,42	1.409.850,92	1.508.183,93	1.622.882,85	1.730.957,30
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Usaha	895.622,51	972.643,43	1.025.928,60	1.130.861,02	1.216.821,24
9.	Jasa- Jasa Lainnya	1.769.148,09	1.915.416,34	2.034.244,83	2.129.301,47	2.128.938,91
	PDRB	16.831.600,88	18.874.403,52	20.069.888,61	19.432.291,68	19.221.443,38

Sumber : LKPJ AMJ 2008-2013 dan **PDRB Prov.NTB Tahun 2012

b. Laju inflasi

Laju inflasi yang terjadi di Provinsi NTB dalam kurun waktu 2009-2012 mengalami fluktuasi sebagaimana gambar berikut.

Gambar 2.3
Laju Inflasi Tahunan NTB dan Nasional Tahun 2008 – Keadaan Oktober 2013



Sumber : LKPJ AMJ dan Publikasi BPS NTB 2013

c. Perkembangan investasi

Minat investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2012 berjumlah Rp 2.539.167.043.000. Sedangkan Penanaman Modal Asing (PMA) dari Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2012 mengalami peningkatan. Jumlah investasi Penanaman Modal Asing (PMA) sampai tahun 2012 adalah 526.529,94 (US\$.000) atau Rp 4.738.769.433.000. Realisasi investasi PMDN dan PMA tahun 2008 sampai 2012, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.13
Investasi PMDN dan PMA Tahun 2008 – 2012

Uraian	Tahun				
	2008	2009	2010	2011	2012
PMDN Rp.000)	695.000.000	749.936.490	195.025.950	160.596.385	614.589.000
PMA(US\$.000)	44.062	56.757	145.688	164.575,69	129.227
*PMA Dalam Rp.000	396.558.000	510.813.000	1.311.192.000	1.481.181.183	1.163.043.000
Total	1.091.558.000	1.260.749.490	1.506.217.950	1.641.777.568	1.777.632.000

Sumber : BKPM & PT Provinsi NTB Tahun 2012

Laju pertumbuhan investasi PMDN pada tahun 2009 sebesar 7,90% dan menjadi 359,92% pada tahun 2012. Sedangkan laju pertumbuhan investasi PMA, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.14
Pertumbuhan Investasi PMDN dan PMA Tahun 2009 – 2012

Uraian	Tahun			
	2009	2010	2011	2012
PMDN (%)	7.90	(73.99)	(17.65)	282,69
PMA (%)	28.81	156.69	12.96	(21,48)
Total	15.50	19.47	9.00	8.28

Sumber : BKPM & PT Provinsi NTB Tahun 2012

Tabel 2.15
Realisasi Investasi Tahun 2008-2012

	2008	2009	2010	2011	2012
PMDN	943.038.812	293.982.482	418.063.753.053	398.156.381.333	398.679.160.609
PMA	4.344.266	2.206.196	260.075.015	143.058.143	115.447.250
Total	40.041.432.812	20.149.746.482	2.758.738.888.053	1.685.679.668.333	1.437.704.410.609
Jumlah Perusahaan					
(1) PMDN	101	103	105	106	51
(2) PMA	241	301	331	342	349
Total	342	404	436	448	400
Serapan Tenaga Kerja	7.416	13.274	13.274	8.466	9.550

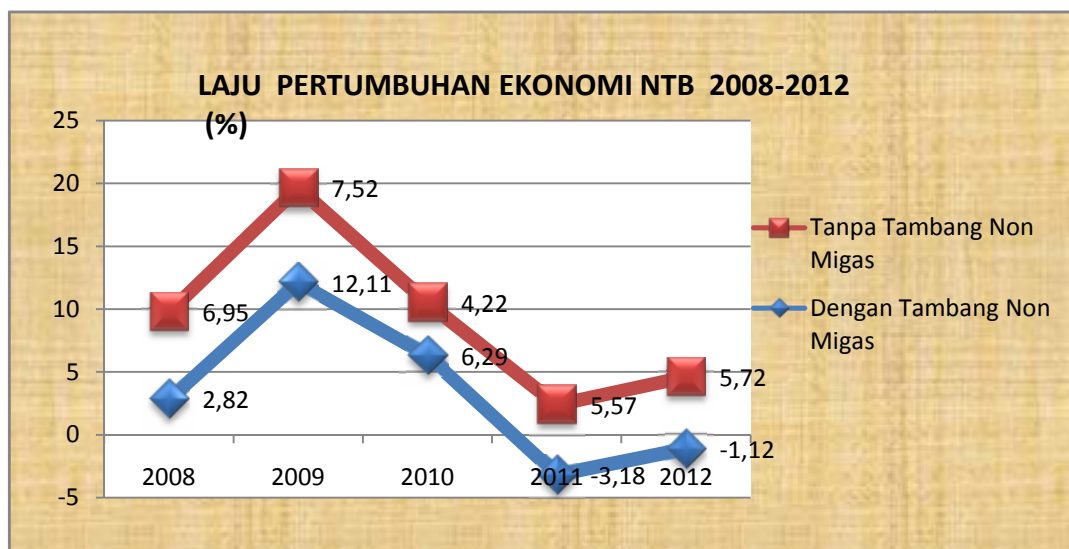
Sumber : Hasil Analisis

Laju pertumbuhan investasi PMDN dan PMA pada tahun 2008 sebesar 40.041.432.812, mengalami peningkatan menjadi 1.437.704.410.609 tahun 2012. Sedangkan jumlah perusahaan pada tahun 2008 sebanyak 342, bertambah menjadi 400 perusahaan pada tahun 2012, dengan serapan tenaga kerja mencapai 7.416 orang pada tahun 2008 bertambah menjadi 9.550 orang tahun 2012.

d. Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTB dari tahun 2008-2012 memperlihatkan kondisi yang fluktuatif dari tahun ke tahun di mana pada tahun 2008, pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB berada pada kisaran angka 6,95% dan 5,72% pada tahun 2012 (tidak termasuk sektor pertambangan). Lebih jelas lihat gambar berikut.

Gambar 2.4
Pertumbuhan Ekonomi NTB ADHK Tahun 2008-2012

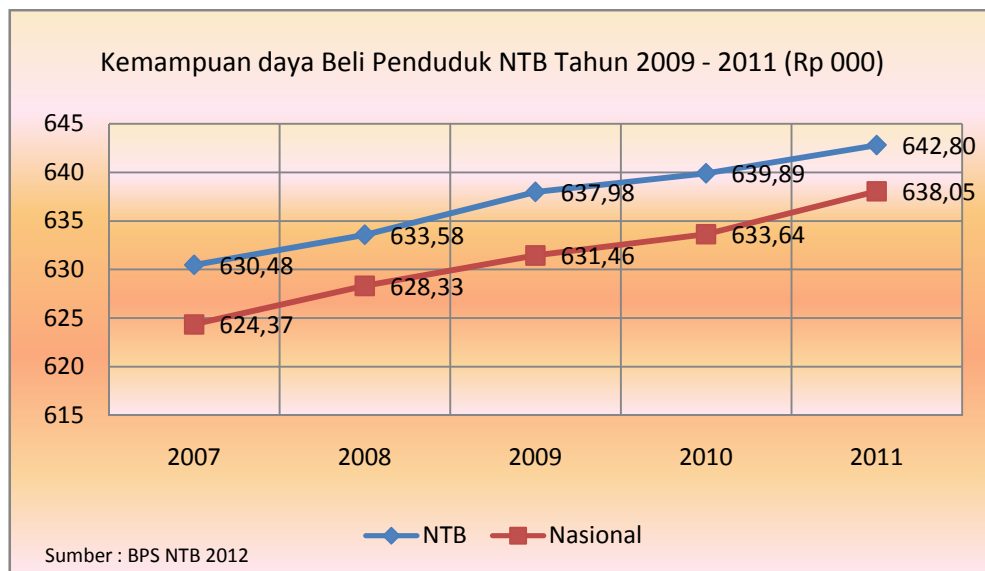


Sumber : Publikasi BPS tahun 2012

e. Daya beli

Kemampuan daya beli masyarakat NTB dari tahun 2008 s.d tahun 2012 menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2008 daya beli penduduk NTB yaitu 630.480 dan pada tahun 2011 meningkat menjadi 642.800. Kemampuan daya beli rata-rata penduduk NTB masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan rata-rata daya beli nasional yang hanya pada besaran 638.050. Lebih jelas lihat gambar berikut.

Gambar 2.5
Daya Beli Penduduk NTB Tahun 2008 – 2011

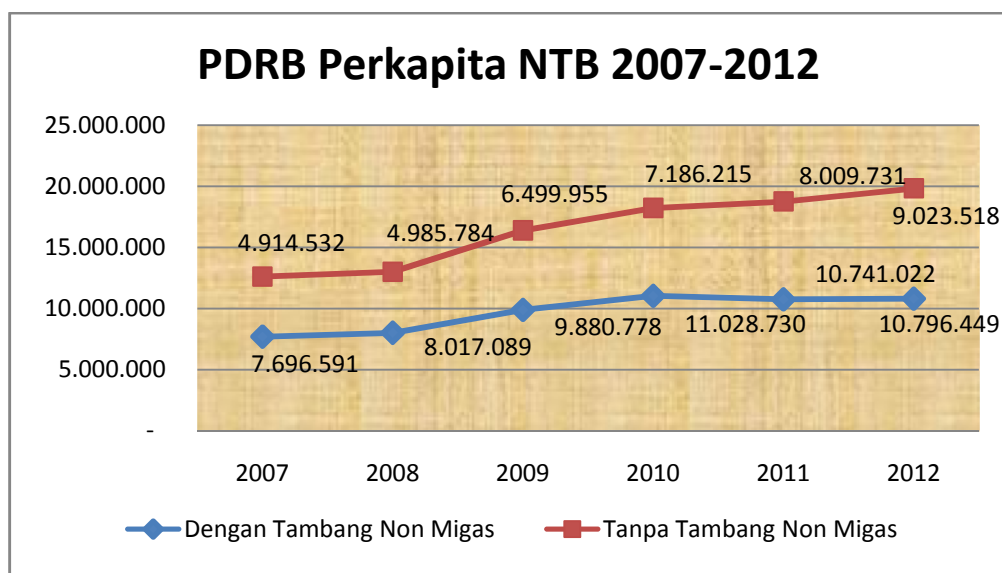


Sumber : NTB Dalam Angka 2013

f. Pendapatan perkapita

Pendapatan perkapita masyarakat NTB (tanpa tambang non migas) juga setiap tahun mengalami peningkatan dari Rp. 4.914.532 menjadi sebesar Rp9.023.518 pada tahun 2012. Lebih jelas lihat gambar berikut.

Gambar 2.6
Pendapatan Perkapita NTB ADHB 2008 – 2012

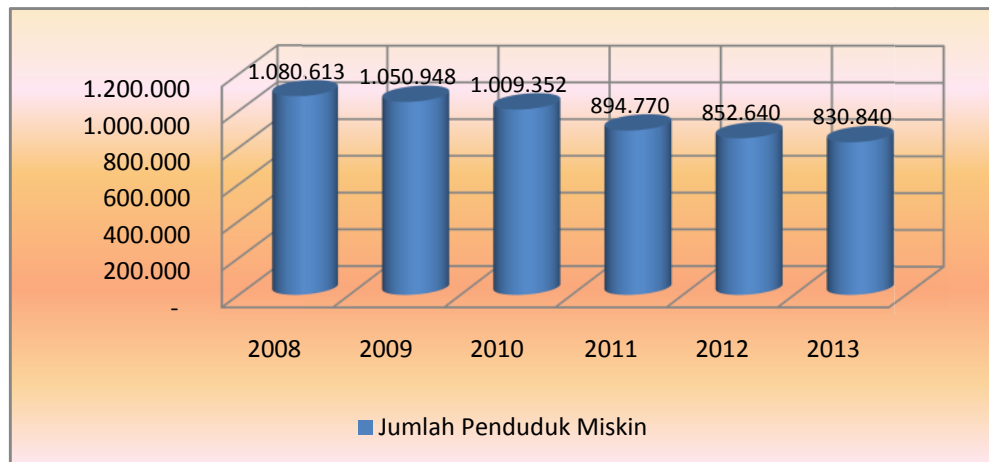


Sumber : LKPJ AMJ dan Publikasi BPS tahun 2012

g. Kemiskinan

Prosentase penduduk miskin pada tahun 2008 sebesar 1.080.613 atau 23,81% menurun menjadi sebesar 17,25% pada tahun 2013. Lebih jelas lihat gambar berikut.

Gambar 2.7
Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi NTB Tahun 2008 – 2013



Sumber : Berita resmi BPS NTB juli 2013

Terkait dengan indikator penurunan angka kemiskinan, jumlah penduduk miskin baik secara absolute maupun relatif di Nusa Tenggara Barat cenderung menurun, hingga tahun 2013 jumlah penduduk miskin sebesar 17,25%.

Tabel 2.16
Jumlah dan Prosentase Penduduk Miskin di Provinsi NTB tahun 2004 – 2013

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	Prosentase Penduduk Miskin	Perubahan
2004	1.031.605	25,26	-1,09 point
2005	1.136.524	25,92	0,66 point
2006	1.156.114	27,17	1,25 point
2007	1.118.452	24,99	-2,28 point
2008	1.080.613	23,81	-1,18 point
2009	1.050.948	22,78	-1,03 point
2010	1.009.352	21,55	-1,23 point
2011	894.770	19,67	-1,88 point
2012	852.640	18,63	-1,10 point
2013	830.840	17,25	-1,38 point

Sumber: BPS NTB

Jumlah penduduk miskin di setiap Kabupaten/Kota dari tahun ke tahun menunjukkan penurunan yang positif, dari tahun 2008 jumlah penduduk miskin sebesar 1.068.820 orang dengan persentase 23,40 % sampai dengan tahun 2012 menjadi 828.234 orang dengan persentase 18,02 %.

Tabel 2.17
Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Kemiskinan
di Kabupaten/Kota Tahun 2008 – 2012

No	Kab/Kota	2008		2009		2010		2011		2012	
		1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
1	Lombok Barat	222.158	25,97	208.485	24,02	129.794	21,59	119.639	19,70	110.542	17,91
2	Lombok Tengah	197.219	22,32	187.585	20,94	171.414	19,92	157.983	18,14	146.031	16,71
3	Lombok Timur	284.262	25,43	270.609	23,96	263.691	23,82	243.058	21,71	224.692	20,07
4	Sumbawa	109.632	25,31	104.980	23,85	90.453	21,75	83.416	19,82	77.085	18,25
5	Dompu	54.730	24,52	49.524	21,76	43.665	19,90	40.279	18,17	37.248	16,57
6	Kab. Bima	94.928	21,79	89.699	20,42	85.250	19,41	78.531	17,66	72.555	16,22
7	Sumbawa Barat	25.170	24,27	24.336	23,01	25.140	21,82	23.135	19,88	21.351	17,6
8	Lombok Utara	--	--	--	--	86.339	43,14	79.545	39,27	73.478	35,97
9	Mataram	61.173	16,13	60.637	15,41	58.272	14,44	53.736	13,18	49.633	11,87
10	Kota Bima	19.548	14,38	18.890	13,65	18.304	12,80	16.868	11,69	15.620	10,54
11	NTB	1.068.820	23,40	1.014.745	21,88	972.321	21,58	896.190	19,67	828.234	18,02

Sumber : Hasil Analisis

Keterangan :

1. Jumlah Penduduk Miskin.
2. Persentase kemiskinan.

h. Angka pengangguran

Jumlah angkatan kerja mengalami dinamika positif yaitu meningkat dari tahun 2008 – 2010 kemudian menurun pada tahun 2011 dan meningkat lagi pada tahun 2012, yang mencerminkan adanya fluktuasi pergeseran penduduk terutama pada kelompok umur muda yang memasuki golongan angkatan kerja. Dilihat dari jenis kelamin, jumlah terbesar adalah penduduk dengan jenis kelamin laki-laki rata-rata mencapai 57,69 % sedangkan sisanya sebesar 42,31% adalah perempuan. Dilihat dari tingkat pertumbuhannya pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2010 sebesar 7,31 % terendah pada tahun 2011 sebesar negatif 7,94% dengan rata-rata pertumbuhan angkatan kerja sebesar 0,25 % dalam kurun waktu 2008 – 2012, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.18
Angkatan Kerja dan Pengangguran Tahun 2008 – 2012

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Angkatan kerja	2.029.081	2.098.636	2.252.076	2.072.782	2.088.712*
	Laki-laki	1.136.835	1.181.891	1.303.836	1.228.000	1.231.296**
	(%)	(56,03)	(56,32)	(57,89)	(59,24)	(58,95)**
	Perempuan	892.246	916.747	948.820	845.000	857.416**
	(%)	(43,97)	(43,68)	(42,11)	(40,76)	(41,05)**
	r (%)	-2,75	3,43	7,31	-7,94	0,77
2	Pengangguran	124.300	131.258	119.143	110.542	109.948*
	Laki-laki	68.337	77.763	72.493	44.000	56.447**
	(%)	(54,98)	(59,24)	(60,85)	(39,64)	(51,34)**
	Perempuan	55.963	53.495	46.650	66.000	53.501**
	(%)	(45,02)	(40,76)	(39,15)	(60,36)	(48,66)**
	r (%)	-8,11	5,60	-9,21	-6,83	-0,95
3	TPT (%)	6,13	6,12	5,29	5,33	5,26
	Target TPT	-	6,20	6,00	5,50	5,25

Sumber : BPS NTB, 2009 – 2011 (diolah).

*) Kondisi Agustus 2012; **) proyeksi

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa pertumbuhan angkatan kerja yang positif berbanding terbalik dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang menganggur pada periode yang sama yang mencapai rata – rata -3,9 %. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan angkatan kerja yang positif telah dibarengi dengan terbukanya lapangan kerja sehingga memberikan kesempatan kerja.

i. Indeks Gini dan Indeks Williamson

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2008 – 2012, Rasio Indeks Gini yang menunjukkan besarnya ketimpangan pendapatan perkapita penduduk di NTB dikategorikan dalam ketimpangan sedang, terlihat dari nilai gini rasionya berkisar antara 0,33 – 0,40, sebagaimana tabel berikut.

Tabel: 2.19
Indeks Gini Provinsi NTB tahun 2008-2012

No	Tahun	Indeks Gini
1	2008	0,33
2	2009	0,35
3	2010	0,40
4	2011	0,36
5	2012	0,36

Sumber : Hasil Analisis

Rasio Indeks Wiliamson yang menunjukkan besarnya ketimpangan pendapatan perekonomian / PDRB antar wilayah NTB terhadap Provinsi lainnya. Berdasarkan analisis Indeks Williamson yang termuat dalam Nota keuangan dan RAPBN Tahun 2012 (diolah dari data BPS), posisi Provinsi NTB bersama Bali dapat diklasifikasikan memiliki indeks ketimpangan rendah dalam periode Tahun 2007-2011, sebagaimana tabel berikut.

Tabel: 2.20
Indeks Williamson Provinsi NTB tahun 2008-2012

No	Tahun	Indeks Williamson
1	2008	0,43
2	2009	0,43
3	2010	0,43
4	2011	0,43
5	2012	NA

Sumber : Hasil Analisis

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

a. Masalah Kesejahteraan Sosial

Pembangunan Kesejahteraan sosial juga merupakan bagian yang terpisahkan dari pembangunan daerah serta memiliki hubungan yang erat dengan pembangunan di bidang dan sektor yang lainnya. Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan untuk menanggulangi dan menuntaskan berbagai permasalahan diantaranya masalah kemiskinan, orang cacat, ketertinggalan, ketertelantaran, ketunaan sosial, penyimpangan perilaku, kekerasan dan korban akibat bencana alam maupun bencana sosial. Tabel berikut memperlihatkan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial di Prov.NTB dari tahun 2009 hingga tahun 2012.

Tabel 2.21
Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Masyarakat
Tahun 2009-2012

No.	Indikator	Satuan	2009	2010	2011	2012
1	Anak Terlantar	Jiwa	200.630	201.699	205.116	205.116
2	Anak Jalanan	Jiwa	10.181	10.005	3.327	3.327
3	Penyandang cacat	Jiwa	397.569	161.147	28.690	16.098
4	Tuna Susila	Jiwa	446	440	508	508
5	Pengemis	Jiwa	558	339	274	274
5	Gelandangan	Jiwa	651	1.275	1.746	1.746

No.	Indikator	Satuan	2009	2010	2011	2012
6	Korban Napza	Jiwa	2.238	1.530	2.707	2.707
7	Keluarga Fakir Miskin	KK	451.353	434.893	373.750	373.750
8	Keluarga Berumah Tidak Layak Huni	KK	117.492	178.904	172.825	172.825
9	Komunitas Adat Terpencil (KAT)	KK	8.938	6.432	9.091	2.758
10	Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA)	Jiwa	3	3	-	708

Sumber: Dinas Sosial kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTB Tahun 2012 (LKPJ AMJ 2008-2013)

b. Pendidikan

Kemajuan pembangunan bidang pendidikan tergambar dari berbagai data berikut. Seluruh indikator baik APK, APM, angka putus sekolah, angka melek huruf maupun angka melanjutkan sekolah menunjukkan nilai positif.

Tabel 2.22
Perkembangan Indikator Bidang Pendidikan Tahun 2008-2012

No.	Indikator Kinerja	Kondisi awal 2007/2008	Target dan Realisasi	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013
1	Angka Rata-rata Lama Sekolah	6,7 Tahun	target realisasi	7,10 6,70	7,50 6,73	8,00 6,77	8,30 6,97	8,61 NA
2	Angka Partisipasi Kasar (APK)							
	-TK/RA	34,78%	target realisasi	- 35,25	- 35,68	- 36,98	- 39,32	- NA
	-SD/MI/Paket A	106,14%	target realisasi	107,58 118,25	109,03 117,10	110,47 111,02	111,91 114,79	111,91 NA
	-SMP/MTs/Paket B	97,80%	target realisasi	98,40 103,64	99,00 103,74	99,60 104,28	100,20 104,81	100,20 NA
	-SMA/MA/SMK	63,12%	target realisasi	64,72 65,16	67,83 69,28	73,24 74,43	77,29 80,54	82,67 NA
3	Angka Partisipasi Murni (APM)							
	-SD/MI/Paket A	97,66%	target realisasi	98,13 98,40	98,58 98,68	99,03 98,92	99,49 99,19	99,95 NA
	-SMP/MTs/Paket B	79,57%	target realisasi	81,67 89,54	83,77 90,53	85,87 92,87	87,97 94,83	90,07 NA
	-SMA/MA/SMK	48,89%	target realisasi	53,45 55,41	57,38 57,83	61,63 62,87	65,87 68,59	70,12 NA
4	Angka Putus Sekolah (DO)							
	-SD/MI/Paket A	1,17%	target realisasi	0,98 1,09	0,79 1,02	0,60 0,90	0,41 0,33	0,20 NA
	-SMP/MTs/Paket B	5,25%	target realisasi	4,30 1,83	3,35 1,46	2,40 0,92	1,45 0,65	0,50 NA
	-SMA/MA/SMK	6,86%	target realisasi	4,20 2,54	3,53 2,13	2,85 1,88	2,18 1,77	1,50 NA
5	Angka Melek Huruf	80,10%	target	84,30	88,45	92,10	96,70	100

No.	Indikator Kinerja	Kondisi awal 2007/2008	Target dan Realisasi	2008/ 2009	2009/ 2010	2010/ 2011	2011/ 2012	2012/ 2013
			realisasi	89,79	92,54	97,95	98,81	NA
6	Angka Melanjutkan							
	-SD/MI ke SMP/MTs	98,58%	target	99,25	99,34	99,78	100	100
			realisasi	106,61	100,29	100,10	100,52	NA
	-SMP/MTs Ke SMA/MA/SMK	80,57%	target	91,65	93,20	94,99	96,76	98,50
			realisasi	89,68	90,28	95,16	95,93	NA

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Provinsi NTB Tahun 2012

Adapun angka partisipasi murni (APK) per-Kabupaten/Kota menunjukkan Kabupaten Sumbawa Barat dan Kota Mataram merupakan Kabupaten/Kota dengan angka partisipasi murni paling baik dan Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Utara memiliki APK relatif rendah disbanding Kabupaten/Kota lainnya.

Tabel 2.23
Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2008-2012

No.	Uraian	Kondisi awal 2007/2008	Target dan Realisasi	Indikator Kinerja Angka Partisipasi Murni (APM)				
				2008/ 2009	2009/ 2010	2010/ 2011	2011/ 2012	2012/ 2013
1	Provinsi	85,14 Tahun	Realisasi	88,72	89,39	91,77	93,27	94,62
2	Kab.Lombok Barat	Tahun	Realisasi	84,89	87,13	88,34	92,01	93,51
3	Kab.Lombok Tengah	Tahun	Realisasi	84,55	84,35	88,98	91,75	92,01
4	Kab.Lombok Timur	Tahun	Realisasi	85,77	87,04	88,97	90,41	92,02
5	Kab.Sumbawa	Tahun	Realisasi	87,96	88,50	90,69	92,06	95,98
6	Kab.Dompu	Tahun	Realisasi	95,86	95,17	98,08	94,97	97,96
7	Kab. Bima	Tahun	Realisasi	97,74	98,25	97,24	97,35	97,91
8	Kab.Sumbawa Barat	Tahun	Realisasi	93,85	95,63	99,42	98,96	99,83
9	Kab.Lombok Utara	Tahun	Realisasi	-	86,16	89,32	91,14	92,25
10	Kota Mataram	Tahun	Realisasi	97,06	96,61	98,63	99,97	99,97
11	Kota Bima	Tahun	Realisasi	99,36	96,60	98,81	97,91	98,82

Sumber: Dikpora Provinsi NTB, 2013

Tabel 2.24
Persentase Angka Melek Huruf Tahun 2012 menurut Kabupaten/Kota

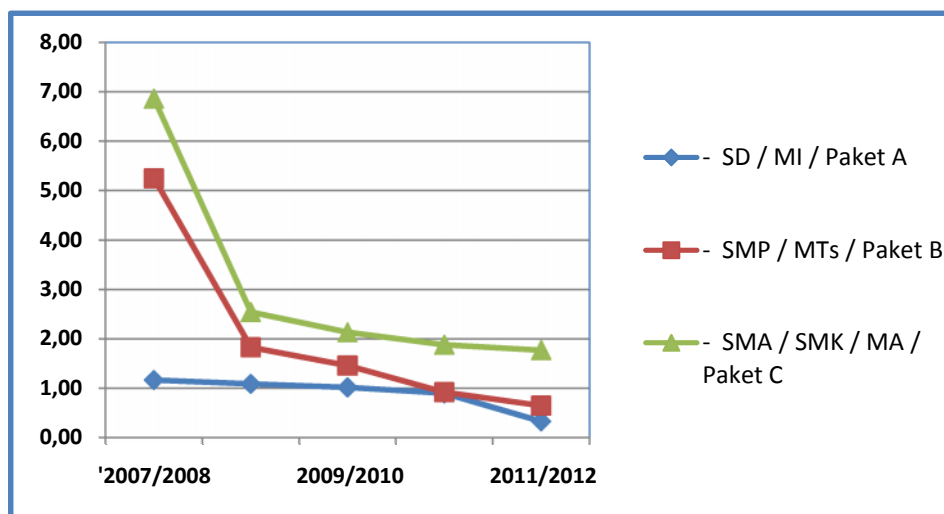
No.	Kabupaten/Kota	Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis	Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas	Angka melek huruf
1	Lombok Barat	80,63 (338.151)	419.361	78,59
2	Lombok Tengah	80,53 (492.490)	611.524	73,92
3	Lombok Timur	87,64 (661.310)	754.576	83,89
4	Sumbawa	93,37 (275.009)	294.522	90,87
5	Dompu	91,67 (132.690)	144.740	87,94

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis	Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas	Angka melek huruf
6	Bima	93,24 (275575)	295.555	87,02
7	Sumbawa Barat	93,33 (73.871)	79.147	92,50
8	Lombok Utara	80,80 (112.989)	139.839	77,00
9	Kota Mataram	90,29 (265.804)	294.390	92,25
10	Kota Bima	95,69 (96.842)	101.204	93,80
	Jumlah	88,72 (2.781.214)	3.134.858	83,68

Sumber: Dikpora Provinsi NTB, 2013

Penurunan persentase jumlah siswa putus sekolah terjadi pada semua jenjang pendidikan. Pada tahun 2011/2012, persentasenya mencapai angka 0,33% pada tingkat SD/MI, 0,65% untuk SMP/MTs, dan 1,77% untuk SMA/MA/SMK yang pada tahun 2007/2008 persentase angka putus sekolah masih berada pada angka 1,17% pada tingkat SD/MI, 5,25% untuk SMP/MTs, dan 6,86% untuk SMA/MA/SMK dengan rata-rata penurunan pertahun 0,07% untuk SD/MI, 1,15% untuk SMP/MTs dan 1,23% untuk SMA/MA/SMK.

Gambar 2.8
Grafik Angka Drop OUT (DO)



Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Provinsi NTB Tahun 2012

Siswa yang lulus dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi juga meningkat. Siswa yang melanjutkan dari jenjang pendidikan SD/MI ke SMP/MTs tahun pelajaran 2011/2012 sebesar 100,52%, sedangkan lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke SMA/MA/SMK sebesar 95,93%. Realisasi angka melanjutkan untuk tamatan SD/MI yang melanjutkan ke SMP/MTs telah melampaui target tahun 2012/2013.

Rata-rata lama sekolah per kabupaten/kota menunjukkan bahwa pada tahun 2013 Kota Mataram memiliki rata-rata lama sekolah tertinggi sebesar 9,68 tahun sedangkan terendah adalah Kabupaten Lombok Utara masih 5,61 tahun, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.25
Angka Rata-Rata Lama Sekolah Per Kabupaten/Kota
Tahun 2008-2012

No.	Uraian	Kondisi awal 2007/2008	Target dan Realisasi	Indikator Kinerja Rata-rata lama Sekolah				
				2008/ 2009	2009/ 2010	2010/ 2011	2011/ 2012	2012/ 2013
1	Provinsi	6,70 Tahun	target	7,10	7,50	8,00	8,30	8,61
			realisasi	6,70	6,73	6,77	6,97	7,19
2	Kab.Lombok Barat	Tahun	Realisasi	5,73	5,87	5,89	6,09	6,10
3	Kab.Lombok Tengah	Tahun	Realisasi	5,35	5,64	5,65	5,99	6,19
4	Kab.Lombok Timur	Tahun	Realisasi	6,31	6,33	6,33	6,61	6,91
5	Kab.Sumbawa	Tahun	Realisasi	7,10	7,12	7,21	7,35	7,64
6	Kab.Dompu	Tahun	Realisasi	7,00	7,20	7,32	7,71	7,97
7	Kab. Bima	Tahun	Realisasi	7,23	7,24	7,26	7,38	7,59
8	Kab.Sumbawa Barat	Tahun	Realisasi	7,00	7,16	7,23	7,52	8,02
9	Kab.Lombok Utara	Tahun	Realisasi	4,68	4,98	5,17	5,60	5,61
10	Kota Mataram	Tahun	Realisasi	9,05	9,20	9,21	9,22	9,68
11	Kota Bima	Tahun	Realisasi	9,24	9,25	9,39	9,71	10,22

Sumber: Dikpora Provinsi NTB, 2013

Sampai tahun ajaran 2012/2013 jumlah murid yang bersekolah di Provinsi NTB tercatat sebanyak 953.447 orang, terdiri dari 823.034 murid sekolah negeri dan 130.413 murid sekolah swasta. Jumlah terbanyak, sebesar 540.381 merupakan murid sekolah dasar. Untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi penduduk yang mengalami keterbatasan fisik dan mental, terdapat 29 sekolah luar biasa (SLB), dan 487 orang guru atau tenaga pengajar yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota. Gambaran mengenai banyaknya sekolah, murid dan guru menurut jenis sekolah terlihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.26
Jumlah Sekolah, Murid dan Guru Menurut Jenis Sekolah 2009/2010-2012/2013

No.	Tingkat Pendidikan	Sekolah		Murid		Guru	
		Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
1.	SLB	12	17	1.127	1.019	244	243
2.	TK	47	1.434	7.298	70.660	1.277	4.943
3.	SD	3.000	80	531.502	8.879	23.792	688
4.	SLTP	396	163	165.653	15.648	7.946	633

No.	Tingkat Pendidikan	Sekolah		Murid		Guru	
		Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
5.	SMA	143	131	77.182	20.729	3.662	936
6.	SMK	84	132	40.272	13.478	2.065	609
Jumlah/Total		3.682	1.957	823.034	130.413	38.986	8.052
2011/2012		3652	1.753	565.123	367.594	38.109	7.092
2010/2011		3.623	1.619	820.580	106.481	38.051	6.720
2009/2010		3.565	1.481	837.756	78.538	37.953	6.841

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Provinsi NTB, Tahun 2012, NTB Dalam Angka 2013

Untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan dibutuhkan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang telah memenuhi standar kualifikasi. Kualifikasi pendidikan, Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan mengalami peningkatan tertinggi terjadi pada jenjang SD yaitu dari 15,85% pada tahun 2008 menjadi 41,91% pada tahun 2012, meningkat sebesar 26,06%. Pada jenjang SMP dari 63,59% pada tahun 2008 menjadi 88,54% pada tahun 2012, meningkat sebesar 24,95%. Pada jenjang SMA dari 94,03% pada tahun 2008 menjadi 96,19% pada tahun 2012, meningkat sebesar 2,16%. Sedangkan pada SMK dari 86,25% pada tahun 2008 menjadi 95,14% pada tahun 2012, meningkat 98,89%. Walaupun terjadi peningkatan kualifikasi, masih 58,09% untuk Guru SD dan 11,46% untuk Guru SMP yang kualifikasi pendidikannya masih dibawah S1/D4, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.27
Kualifikasi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan

NO.	Jenjang Pendidikan	2008			2012				
		GT	Kualifikasi $\geq$ S1/D4	%	GT	GTT	Jumlah	Kualifikasi $\geq$ S1/D4	%
1	TK	2.015	Na	Na	2.724	3.534	6.258	1.084	17,32
2	SLB	345	Na	Na	438	-	438	188	42,93
3	SD	21.840	3.463	15,85	23.908	17.708	41.616	17.441	41,91
4	SMP	6.029	3.834	63,59	8.544	7.545	16.089	14.245	88,54
5	SMA	3.048	2.866	94,03	4.567	4.510	9.077	8.731	96,19
6	SMK	1.251	1.079	86,25	2.612	3.456	6.068	5.773	95,14
Jumlah		34.528	11.242	32,56	42.793	36.753	79.546	47.463	59,67

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Provinsi NTB, Tahun 2012

b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks berbagai komponen pembentuk IPM Provinsi NTB selama periode 2007-2011 mengalami peningkatan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.28
Perkembangan Indikator IPM Provinsi NTB Tahun 2007-2012

NO.	Komponen IPM	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	Angka Harapan Hidup (Tahun)	61,20	61,50	61,80	62,11	62.41	62,73
2	Indeks Pendidikan:						
	a. Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	6,70	6,70	6,73	6,77	6.97	7,19
	b. Angka Melek Huruf (%)	80,10	83,30	83,80	81,05	83.24	83,68
3	Paritas Daya Beli (Rupiah)	630.480	633.380	637.980	639.890	642.800	645.720
	Indeks Pembangunan Manusia	63.71	64.12	64.66	65.20	66.23	66,89

Sumber: * angka sementara BPS Provinsi NTB September 2013 (Publikasi BPS NTB 2013)

Perkembangan IPM periode 2007-2011 Seluruh Kabupaten/kota mengalami peningkatan IPM dengan nilai bervariasi. IPM tertinggi terjadi di Kota Mataram, dengan nilai di atas rata-rata IPM Provinsi NTB, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.29
IPM Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2007 – 2012

No.	Kabupaten/kota	IPM (0-100)					
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	Kabupaten Lombok Barat	59,34	60,13	61,27	61,27	62.50	63,19
2	Kabupaten Lombok Tengah	59,00	59,66	60,26	60,73	61.66	62,57
3	Kabupaten Lombok Timur	61,10	61,77	62,21	62,68	63.93	64,91
4	Kabupaten Sumbawa	64,90	65,36	65,72	66,07	66.67	67,23
5	Kabupaten Dompu	64,00	64,40	64,93	65,51	66.70	67,58
6	Kabupaten Bima	63,80	64,39	64,81	65,18	65.74	66,52
7	Kabupaten Sumbawa Barat	65,50	65,64	66,16	66,47	67.08	67,85
8	Kota Mataram	70,70	71,41	71,82	72,32	72.83	73,70
9	Kota Bima	67,10	67,52	68,02	68,56	69.10	69,83
10	Lombok Utara	-	57,79	58,40	58,96	60.93	61,37
	Provinsi NTB	63,71	64,12	64,66	65,20	66.23	66,89

Sumber: * angka sementara BPS Provinsi NTB September 2013

c. Kesehatan

Pemerintah telah meluncurkan program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang memberikan pelayanan persalinan gratis bagi ibu melahirkan di puskesmas dan rumah sakit milik pemerintah dan swasta serta menetapkan anggaran pelayanan kesehatan gratis sebesar Rp 60 ribu per orang per tahun bagi 301.176 warga miskin yang belum terjangkau Jaminan Kesejahteraan

Masyarakat (Jamkesmas). Jumlah pasien yang telah terlayani oleh puskesmas dan jaringannya se-NTB sebanyak 322.694 orang dan pelayanan di Rumah Sakit Provinsi dan kab/kota se-NTB sebanyak 78.089 orang.

Puskesmas sebagai salah satu layanan masyarakat yang mudah dan terjangkau untuk semua lapisan masyarakat mengalami peningkatan pada tahun 2012 menjadi 157 unit yang sebelumnya mencapai 153 puskesmas. Bahkan guna mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di wilayah pulau Sumbawa, pemerintahpun telah membangun Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) di Sumbawa Besar, ibukota Kabupaten Sumbawa. RSUP ini telah beroperasi sejak 17 Desember 2011, termasuk pengembangan Rumah Sakit Umum Provinsi yang ada di Mataram.

Peningkatan fasilitas juga diiringi dengan peningkatan tenaga kesehatan. Hingga tahun 2012 jumlah tenaga kesehatan mencapai 14.468 orang atau terjadi peningkatan dari sebelumnya yang mencapai 9.881 orang. Dampak semua gerakan ini ditandai dengan menurunnya Angka Kematian Bayi dari 68,96 per 1000 kelahiran hidup pada 2009 menjadi 55,5 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2012. Sementara penurunan angka kematian ibu cukup signifikan dari 305,5 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2009 menurun menjadi 242,9 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2012, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.30
Indikator Kesehatan 2008-2012

No.	Indikator	Satuan	Realisasi tahun					Target RPJMD 2013
			2008	2009	2010	2011	2012	
1	Usia Harapan Hidup	Tahun	61,5	61,80	62,11	62,41	NA	66,18
2	Angka Kematian bayi	Per 1000 KH	70,5	68,96	66,34	62,26	55,5	42
3	Angka Kematian ibu	Per 100.000 KH	312,7	305,5	294,3	280,5	242,9	260
4	Penanganan HIV dan AIDS	%	100	100	100	100	100	95
5	Prevalensi Gizi Buruk	%	5,32	5,49	4,77	4,57	3,52	4,12
6	Cakupan Jamban Keluarga	%	60,02	61,53	64,19	74,40	68,21*	80

Ket. / Sumber:

- Usia Harapan Hidup : data BPS
- Angka kematian ibu dan angka kematian bayi : data estimasi berdasarkan indikator program (Dikes)
- Cakupan jamban keluarga, penanganan HIV dan AIDS : data program sampai dengan Oktober 2012.*

Tabel-tabel berikut menyajikan informasi tambahan terkait kemajuan pembangunan sosial 5 tahun lainnya, mulai dari angka usia harapan hidup, gizi buruk, sarana prasarana kesehatan, sampai kepada tenaga medis yang diurai per Kabupaten/kota.

Tabel 2.31
Angka Usia Harapan Hidup Tahun 2008-2012

No.	Indikator Angka Usia Harapan Hidup	Satuan	Realisasi tahun					Target RPJMD 2013
			2008	2009	2010	2011	2012	
1	Provinsi	Tahun	61,5	61,80	62,11	62,41	62,73	66,18
2	Kab.Lombok Barat	Tahun	Na	Na	Na	61,28	61,71	Na
3	Kab.Lombok Tengah	Tahun	Na	Na	Na	61,52	61,96	Na
4	Kab.Lombok Timur	Tahun	Na	Na	Na	61,32	61,88	Na
5	Kab.Sumbawa	Tahun	Na	Na	Na	60,82	60,93	Na
6	Kab.Dompu	Tahun	Na	Na	Na	61,16	61,26	Na
7	Kab.Bima	Tahun	Na	Na	Na	63,24	63,55	Na
8	Kab.Sumbawa Barat	Tahun	Na	Na	Na	61,45	61,61	Na
9	Kab.Lombok Utara	Tahun	Na	Na	Na	60,94	61,32	Na
10	Kota Mataram	Tahun	Na	Na	Na	67,13	67,62	Na
11	Kota Bima	Tahun	Na	Na	Na	63,10	63,22	Na

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Tahun 2012

Tabel 2.32
Prosentase Balita Gizi Buruk Tahun 2008-2012

No.	Indikator Prosentase Balita Gizi Buruk	Satuan	Realisasi tahun					Target RPJMD 2013
			2008	2009	2010	2011	2012	
1	Provinsi	%	5,32	5,49	4,77	4,57	3,52	4,12
2	Kab.Lombok Barat	%	Na	8,16	9,77	9,53	13,55	Na
3	Kab.Lombok Tengah	%	Na	10,38	12,02	11,17	10,02	Na
4	Kab.Lombok Timur	%	Na	6,06	11,13	8,97	9,25	Na
5	Kab.Sumbawa	%	Na	8,22	11,50	8,78	8,67	Na
6	Kab.Dompu	%	Na	7,95	12,70	10,25	8,94	Na
7	Kab.Bima	%	Na	6,44	9,78	6,47	5,56	Na
8	Kab.Sumbawa Barat	%	Na	7,38	5,14	5,73	5,99	Na
9	Kab.Lombok Utara	%	Na	18,58	5,37	9,52	5,39	Na
10	Kota Mataram	%	Na	6,50	7,87	8,21	7,79	Na
11	Kota Bima	%	Na	Na	Na	Na	Na	Na

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Tahun 2012

Tabel 2.33
Rasio Posyandu per satuan Balita Tahun 2008-2012

No.	Uraian	Satuan	Rasio Posyandu Per satuan Balita				
			2008	2009	2010	2011	2012
1	Provinsi	%	Na	Na	Na	Na	Na
2	Kab.Lombok Barat	%	91	92	96	77	78
3	Kab.Lombok Tengah	%	62	64	65	60	59
4	Kab.Lombok Timur	%	91	88	88	90	78
5	Kab.Lombok Utara	%	0	85	85	72	64
6	Kab.Sumbawa	%	88	84	78	83	78
7	Kab.Dompu	%	90	91	105	74	63
8	Kab.Bima	%	101	105	103	99	98
9	Kab.Sumbawa Barat	%	70	73	71	68	66
10	Kota Mataram	%	116	115	115	94	91
11	Kota Bima	%	110	103	85	109	105

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Tahun 2012

Tabel 2.34
Jumlah Rumah Sakit Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2008- 2012

Kabupaten/Kota	Rumah Sakit				
	Umum	Jiwa	Kusta	TNI/Polri	Swasta
Lombok Barat	1	-	-	-	-
Lombok Tengah	1	-	-	-	1
Lombok Timur	1	-	-	-	1
Sumbawa	1	-	-	-	-
Dompu	1	-	-	-	-
Bima	1	-	-	-	-
Sumbawa Barat	1	-	-	-	-
Lombok Utara	1	-	-	-	-
Kota Mataram	1	-	-	-	5
Kota Bima	-	-	-	-	1
Provinsi	2	1	-	2	-
Jumlah/Total	11	1	0	2	8
2011	10	1	0	0	8
2010	8	1	1	2	6
2009	7	1	1	2	6
2008	7	1	1	2	5

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi NTB, NTB Dalam Angka 2013

Tabel 2.35
Jumlah Unit Pelayanan Kesehatan Dasar Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2008-2012

Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Dasar			
	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Pos Kesehatan Desa	Pos Pelayanan Terpadu
Lombok Barat	16	56	110	724
Lombok Tengah	25	94	119	1.501
Lombok Timur	29	87	132	1.557
Sumbawa	25	93	35	645
Dompu	9	47	56	369
Bima	20	86	121	766
Sumbawa Barat	9	27	63	206
Lombok Utara	8	29	31	333
Kota Mataram	11	16	19	343
Kota Bima	5	19	35	154
Jumlah/Total	157	554	721	6.598
2011	153	550	546	6.102
2010	150	527	577	5.903
2009	147	534	565	5.881
2008	142	513	495	5.786

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi NTB, NTB Dalam Angka 2013

Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan tentunya juga harus diikuti oleh peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia di bidang kesehatan untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan pada masyarakat Nusa Tenggara Barat. Hingga Tahun 2012 jumlah tenaga kesehatan mencapai 14.468 orang yang pada tahun sebelumnya mencapai 9.881 orang.

Tabel 2.36
Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kategori Tahun 2008-2011

No	Kategori	2008	2009	2010	2011
1.	Tenaga Medis	444	497	616	651
a.	Dokter Spesialis	66	71	83	95
b.	Dokter Umum	293	332	424	441
c.	Dokter Gigi	85	94	109	115
2.	Tenaga Kesehatan Lainnya	419	485	541	637
3.	Tenaga Paramedis	5.341	5.580	6.394	6.467
a.	Paramedis Perawatan	3.846	3.832	4.422	4.802

No	Kategori	2008	2009	2010	2011
b.	Paramedis Non Perawatan	1.495	1.748	1.972	1.665
4.	Tenaga Non Paramedis	1.561	1.695	1.972	2.126
Jumlah/Total		7.765	8.257	9.523	9.881

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi NTB, NTB Dalam Angka 2012

Tabel 2.37

Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kategori Tahun 2012

No	Kategori	2012
1.	Tenaga Medis	953
a.	Dokter Spesialis	119
b.	Dokter Umum	651
c.	Dokter Gigi	183
2.	Tenaga Keperawatan	4.963
3.	Tenaga Bidan	2.170
4.	Tenaga Kefarmasian	417
5.	Tenaga Kesehatan Masyarakat	431
6.	Tenaga Sanitasi	397
7.	Tenaga Ahli Gizi	635
8.	Tenaga Keterampilan Fisik	45
9.	Tenaga Keteknisian Medis	755
10.	Tenaga Non Kesehatan	3.702
Jumlah/Total		14.468

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi NTB, NTB Dalam Angka 2013

2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

a. Seni budaya

Keberadaan grup kesenian, dewan kesenian daerah, lembaga adat di Provinsi NTB masih rendah setidaknya tergambar dari rasio lembaga seni budaya per 10.000 penduduk hanya 0-1 lembaga seni budaya per 10.000 penduduk. Rendahnya jumlah lembaga seni budaya ini diantaranya masih kurangnya event kesenian dan budaya, belum sinkronnya program pemerintah provinsi dengan Kabupaten/Kota terkait dengan pelaksanaan event-event budaya di kabupaten/kota, masih minimnya tenaga pelatih seni, sarana dan prasarana pertunjukan kesenian.

Tabel 2.38

Rasio Lembaga Seni Budaya per 10.000 penduduk di Prov.NTB Tahun 2012

No	Lembaga Seni dan Budaya	Tahun 2012
1	Grup Kesenian/sanggar seni	307
2	Pusat Latihan Kesenian	-
3	Dewan Kesenian Daerah	13
4	Lembaga Adat	8
5	Jumlah Lembaga	328
6	Jumlah Penduduk	4.587.562
	Rasio Lembaga per 10.000 penduduk	0,71

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB 2013

b. Olahraga

Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga di Provinsi Nusa Tenggara Barat diwujudkan melalui berbagai kegiatan, seperti: Pemberdayaan Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) sebagai wadah pembinaan atlet pelajar berbakat berusia 13-17 tahun dan PPLM bagi mahasiswa.

Peningkatan prestasi baik di even nasional maupun internasional sudah menunjukkan prestasi yang menggembirakan dengan mengangkat nama NTB diajang nasional dan mengharumkan nama bangsa ditingkat internasional yang dibuktikannya dengan perolehan medali dalam berbagai kejuaraan olahraga pelajar seperti POPNAS, POPWIL, Kejuaraan Nasional Antar Pelajar, Kejuaraan Sirkuit Yuniior, Grand Jatim Sprint dan Asean School & Asean Yuniior di Singapura, serta Arafura Youth Games di Australia ditingkat internasional. Rasio klub olahraga pada tahun 2012 sebesar 3,40 menunjukkan bahwa tersedia sebanyak 3-4 klub untuk tiap 10.000 penduduk, sedangkan hanya tersedia 0-1 gedung dan lapangan olahraga untuk setiap 10.000 penduduk di Prov.NTB. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.39

Sarana dan Prasarana Olahraga di Provinsi NTB Tahun 2012

No.	Sarana & Prasarana Olahraga	Tahun 2012
1	Klub Olahraga	1.562
2	Gedung Olahraga	30
3	Lapangan Olahraga	129
	Jumlah Penduduk	4.587.562
4	Rasio klub olahraga	3,40
5	Rasio gedung & Lapangan olahraga	0,35

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan olahraga Prov. NTB 2013

Tabel 2.40
Rasio Sarpras Olahraga per 10.000 penduduk menurut
Kabupaten/Kota se Prov.NTB tahun 2012

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (jiwa)	Gedung & Lapangan Olahraga (unit)	Rasio per 10.000 Penduduk
1	Kota Mataram	413.210	5	0,12
2	Kabupaten Lombok Barat	613.161	22	0,36
3	Kabupaten Lombok Utara	203.564	9	0,44
4	Kabupaten Lombok Tengah	875.231	25	0,29
5	Kabupaten Lombok Timur	1.123.488	24	0,21
6	Kota Bima	146.307	5	0,34
7	Kabupaten Bima	447.286	17	0,38
8	Kabupaten Dompu	223.678	12	0,54
9	Kabupaten Sumbawa Barat	118.608	10	0,84
10	Kabupaten Sumbawa	423.029	20	0,47
	Jumlah	4.587.562	149	0,32

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Prov.NTB 2013

2.2.4. Standar Pelayanan Minimal

Sampai saat ini Pemerintah telah menetapkan SPM sebanyak 15 (lima belas) bidang urusan yang terdiri dari: 9 (sembilan) SPM diterapkan pada Pemerintahan Daerah Provinsi dan 15 (lima belas) SPM diterapkan pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Masing – masing SPM yang telah ditetapkan tersebut, memiliki karakteristik yang berbeda baik dari jumlah maupun jenis pelayanan, serta jumlah indikator maupun target capaian. Setidaknya dari 15 (lima belas) SPM yang sudah ditetapkan terdapat 13 (tiga belas) SPM yang target capaiannya antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, 1 (satu) SPM dengan target capaian tahun 2016 dan 1 (satu) dan SPM dengan target capaian tahun 2025.

Adapun realisasi pencapaian target kinerja 9 (Sembilan) Bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 – 2012 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.41
Realisasi Pencapaian Target Kinerja
9 (Sembilan) Bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Provinsi NTB Tahun 2008-2012

No	Bidang/Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi Pencapaian Target (2012)		
					2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sosial						
1.1	Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial:						
	a. Pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial skala Provinsi	Persentase (%) PMKS skala provinsi yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	80%	2008-2015	0.67	0.91	9.06
	b. Penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi dalam panti sosial skala Provinsi	Persentase (%) Panti Sosial skala Provinsi yang melaksanakan standar operasional pelayanan kesejahteraan sosial.	60%	2008-2015	100	100	100
1.2	Penyediaan sarana dan prasarana sosial :						
	a. Penyediaan sarana prasarana panti sosial skala provinsi	Presentase (%) panti sosial skala provinsi yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	80%	2008-2015	100	100	100
	b. Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala provinsi	Presentase (%) Organisasi Sosial/Yayasan/LSM yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial luar panti.	60%	2008-2015	32.41	39.57	39.70
1.3	Penanggulangan korban Bencana:						
	a. Bantuan sosial bagi korban bencana skala provinsi	Presentase (%) kabupaten/ kota yang memberikan bantuan sosial bagi korban	80%	2008-2015	100	100	100

No	Bidang/Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi Pencapaian Target (2012)		
					2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		bencana skala provinsi.					
	b. Evaluasi korban bencana skala provinsi	Presentase (%) kabupaten/kota yang menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap untuk evakuasi korban bencana skala provinsi	80%	2008-2015	100	100	100
1.4	Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial:						
	- Penyelenggaraan jaminan sosial skala provinsi	Presentase (%) kabupaten/kota yang menyelenggarakan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial	40%	2008-2015	100	100	100
2	Lingkungan Hidup						
2.1	Jenis pelayanan Informasi status mutu air	Persentase jumlah sumber air yang dipantau kualitasnya, ditetapkan status mutu airnya dan di informasikan status mutu airnya	100	2013	100	100	100
2.2	Pelayanan Informasi Status Mutu Udara Ambien	Persentase Jumlah Kabupaten/Kota yang dipantau kualitas udara ambiennya dan di informasikan mutu udara ambiennya	100	2013	-	-	100
2.3	Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100	2013	100	100	100
3	Perumahan Rakyat						
3.1	Rumah layak huni dan	a. Cakupan	100%	2009-2025	69.30%	69.03%	-

No	Bidang/Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi Pencapaian Target (2012)		
					2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	terjangkau	ketersediaan rumah layak huni					
		b. Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau	70%	2009-2025	4.14%	6.98%	-
3.2	Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan lingkungan yg sehat dan aman yg didukung Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU)	100%	2009-2025	38.72%	38.4%	37.3%
4	Perempuan dan Anak						
4.1	Penanganan Pengaduan/ Laporan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu	100%	2014		24.31	26.08
		- Cakupan ketersediaan petugas di Unit Pelayanan Terpadu yg memiliki kemampuan utk menindaklanjuti pengaduan/laporan masyarakat				24.31	26.08
4.2	Pelayanan Kesehatan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT / PKT di RS	100%	2014			
		a. Cakupan Puskesmas mampu tatalaksana kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtP/A)				24.31	16.37

No	Bidang/Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi Pencapaian Target (2012)		
					2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		b. Cakupan RSU Vertikal/RSUD/RS Swasta/RS Polri yang melaksanakan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan			-	-	-
		c. Cakupan tenaga kesehatan terlatih tentang tatalaksana kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtP/A) di Puskesmas			-	-	-
		d. Cakupan tenaga kesehatan terlatih tentang tatalaksana kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Rumah Sakit			-	-	-
4.3	Rehabilitasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang Diberikan oleh Petugas Rehabilitasi sosial Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu	75%	2014	-	2.69	2.62
		- Cakupan petugas rehabilitasi sosial yang terlatih			-	-	-
		Cakupan Layanan Bimbingan Rohani yang Dierikan Oleh Petugas Bimbingan Rohani Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan	75%	2014	-	-	-

No	Bidang/Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi Pencapaian Target (2012)		
					2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Terpadu					
		- Cakupan petugas bimbingan rohani terlatih dalam melakukan bimbingan rohani			-	-	-
4.4	Penegakan dan Bantuan Hukum Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan sampai dengan Putusan Pengadilan atas Kasus-kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	80%	2014	-	52.34	24.98
		a. Cakupan penyelesaian penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di tingkat kepolisian			-	-	-
		b. Cakupan ketersediaan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di Polda dan Polres/ta			-	-	-
		c. Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana di UPPA			-	-	-
		d. Cakupan ketersediaan polisi yang terlatih dalam memberikan layanan yang sensitif gender			-	-	-
		e. Cakupan ketersediaan jaksa yang terlatih dalam penuntutan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak			-	-	-

No	Bidang/Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi Pencapaian Target (2012)		
					2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		f. Cakupan ketersediaan hakim yang terlatih dalam menangani perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak			-	-	-
		Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	50%	2014	-	52.34	24.98
		- Cakupan ketersediaan petugas pendamping hukum atau advokat yang mempunyai kemampuan pendampingan pada saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak			-	-	-
4.5	Pemulangan dan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Cakupan Layanan Pemulangan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	50%	2014	-	-	-
		Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	100%	2014	-	1.22	3.54
		- Cakupan ketersediaan petugas terlatih untuk melakukan reintegrasi sosial			-	-	-
5	Ketenagakerjaan						
5.1	Pelayanan Pelatihan Kerja	a. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis	75%	2016	-	57.63	40.66

No	Bidang/Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi Pencapaian Target (2012)		
					2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		kompetensi					
		b. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	60%	2016	-	86.76	72.78
		c. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	60%	2016	-	59.52	75
5.2	Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	70%	2016	-	91.36	93.75
5.3	Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	50%	2016	-	100	29.55
5.4	Pelayanan Kepesertaan Jamsostek	Besaran Pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek	50%	2016	-	100	86.29
5.5	Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan	a. Besaran pemeriksaan perusahaan	45%	2016	-	98.28	94.01
		b. Besaran pengujian peralatan di perusahaan	50%	2016	-	99.59	102.85
6	Ketahanan Pangan						
6.1	Ketersediaan dan Cadangan Pangan	Penguatan Cadangan Pangan	60%	2015	6.76	14.51	83.52
6.2	Distribusi dan Akses Pangan	Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah	100%	2015	-	-	92.69
6.3	Penganekaragaman dan Keamanan Pangan	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	80%	2015	-	-	61.11
6.4	Penanganan Kerawanan Pangan	Penanganan Daerah Rawan Pangan	60%	2015	31.25	39.06	100
7	Kesenian						
7.1	Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Bidang Kesenian	a. Cakupan Kajian Seni	50%	2014	107	120	107
		b. Cakupan Kajian Seni	30%	2014	286%	286%	286%

No	Bidang/Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi Pencapaian Target (2012)		
					2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		c. Cakupan Gelar Seni	75%	2014	133%	133%	133%
		d. Misi Kesenian	100%	2014	100%	100%	100%
7.2	Sarana dan Prasarana	a. Cakupan Sumberdaya Manusia Kesenian	25%	2014	300%	300%	300%
		b. Cakupan Tempat	100%	2014	0	0	0
		c. Cakupan Organisasi		2014	98.04	196.08	294.12
8	Perhubungan						
8.1	Angkutan Jalan						
	a. Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Provinsi	100%	2014	80.00	-	-
	b. Jaringan Prasarana Angkutan Jalan	Tersedianya terminal angkutan penumpang tipe A pada setiap Provinsi untuk melayani angkutan umum dalam trayek.	100%	2014	100.00	100.00	100.00
	c. Fasilitas Perlengkapan Jalan	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrail) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Provinsi	60%	2014	-	16.00	-
	d. Keselamatan	Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP).	100%	2014	20.00	20.00	20.00
	e. Sumber Daya Manusia (SDM)	Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada perusahaan angkutan umum, pengelola terminal, dan pengelola perlengkapan jalan.	100%	2014	-	12.00	-
8.2	Angkutan Sungai dan Danau.		75%	2014	100.00	100.00	100.00
	a. Jaringan Pelayanan Angkutan Sungai dan Danau	Tersedianya angkutan sungai dan danau untuk melayani	60%	2014	25.00	25.00	25.00

No	Bidang/Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi Pencapaian Target (2012)		
					2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		jaringan trayek antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi pada wilayah yang tersedia alur pelayaran sungai dan danau yang dapat dilayari.					
	b. Jaringan Prasarana Angkutan Sungai dan Danau	Tersedianya pelabuhan sungai dan danau untuk melayani kapal sungai dan danau yang beroperasi pada jaringan trayek antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi pada wilayah yang tersedia alur pelayaran sungai dan danau yang dapat dilayari	100%	2014	86.67	82.35	80.00
	c. Keselamatan	Terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroperasi pada trayek antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi.	100%	2014	100.00	100.00	100.00
	d. Sumber Daya Manusia (SDM)	Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi sebagai awak kapal angkutan sungai dan danau.	75%	2014	100.00	100.00	100.00
8.3	Angkutan Penyeberangan		75%	2014	30.00	30.00	30.00
	a. Jaringan Pelayanan Angkutan Penyeberangan	Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang menghubungkan jalan Provinsi yang terputus oleh perairan	100%	2014	86.67	82.35	80.00
	b. Jaringan Prasarana Angkutan Penyeberangan	Tersedianya pelabuhan pada setiap ibukota Provinsi dan ibukota Kabupaten/Kota yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi dan tidak ada alternatif	100%	2014	100.00	100.00	100.00

No	Bidang/Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi Pencapaian Target (2012)		
					2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		jalan					
	c. Keselamatan	Terpenuhinya standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT dan kapal yang beroperasi pada lintas penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi.	100%	2014	-	-	-
	d. Sumber Daya Manusia (SDM)	Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi sebagai awak kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT.	100%	2014	-	-	-
8.4	Angkutan Laut		100%	2014	-	-	-
	a. Jaringan Pelayanan Angkutan Laut	Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif jalan	100%	2014	-	-	-
	b. Jaringan Prasarana Angkutan Laut	Tersedianya dermaga pada setiap ibukota Provinsi dan ibukota Kabupaten/Kota untuk melayani kapal laut yang beroperasi pada lintas trayek antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan	100%	2014	-	-	-
	c. Keselamatan	Terpenuhinya standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT dan kapal yang beroperasi antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi.	100%	2014	-	-	-
	d. Sumber Daya Manusia (SDM)	Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi sebagai awak kapal untuk angkutan laut dengan ukuran di bawah 7 GT.	60%	2014	80.00	-	-
9	Penanaman Modal						

No	Bidang/Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi Pencapaian Target (2012)		
					2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
9.1	Kebijakan Penanaman Modal adalah serangkaian peraturan perundang-undangan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi penanam modal, memperkuat daya saing perekonomian dan mempercepat peningkatan Penanaman modal di sektor/bidang usaha unggulan daerah	Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan sampai dengan 2014 sekurang-kurangnya 1 (satu) sektor/bidang usaha pertahun :	1 (satu) sektor/ bidang usaha/ tahun	2014	Sektor	Sektor	Sektor
		- Nama Bidang Usaha (Jenis Bidang Usaha yang dilakukan)			8	0	8
		- Lokasi Peluang Usaha (Tempatnya pelaksanaan Kegiatan Bidang Usaha)			8	0	8
		- Ketersediaan Lahan (Ha)			8	0	8
	Sektor bidang usaha unggulan adalah sektor/bidang usaha yang memiliki keunggulan komparatif (comparative advantage) di daerahnya.	- Kesesuaian dengan Tata Ruang Daerah (sudah sesuai atau belum dan alasannya			0	0	0
		- Bentuk Dukungan pemerintah Daerah (Keuangan, Perijinan dll)			8	0	8
	Informasi Peluang Usaha Mencakup : Lokasi, Ketersediaan lahan, Kesesuaian dengan tata ruang, daerah, bentuk dukungan pemerintah daerah, Potensi Pasar, Perkiraan Investasi	- Potensi Pasar			8	0	8
		- Perkiraan Investasi (Perkiraan nilai (Rp) investasinya)			1	0	3
9.2	Kerjasama	Terselenggaranya					

No	Bidang/Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi Pencapaian Target (2012)		
					2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Penanaman Modal Oleh PDPKM fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara UMKMK tingkat Kabupaten/Kota dengan pengusaha tingkat Provinsi/Nasional	fasilitasi pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam rangka kerjasama kemitraan:					
		- Antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) tingkat kabupaten/kota dengan pengusaha tingkat provinsi/nasional	1 (satu) kali/ tahun	2014	2 kali	3 kali	4 kali
		- Jumlah UMKMK potensial yang akan dimitrakan di Kab/Kota	1 (satu) kali/ tahun	2014	2	3	4
		- Jumlah Potensi Pengusaha Provinsi /Nasional yang berminat melakukan kemitraan dengan UMKMK tingkat Kabupaten/Kota			0	0	0
9.3	Promosi Penanaman Modal PDKPM adalah kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan citra Indonesia dan Citra Kabupaten Kota secara khusus sebagai daerah tujuan penanaman modal yang kondusif dan meningkatnya minat akan peluang penanaman modal yang prospektif di Kabupaten/kota tersebut	- Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal tingkat Kabupaten.	1 (satu) kali/ tahun	2014	1 kali	1 kali	1 kali
		- Tindak Lanjut Kegiatan Hasil Promosi Penanaman Modal tingkat Kabupaten (Jenis	1 (satu) kali/ tahun	2014	0	0	0

No	Bidang/Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi Pencapaian Target (2012)		
					2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		kegiatan Promosi)					
9.4	a. Pelayanan Penanaman Modal	Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dibidang penanaman modal : Rumus: Jumlah jenis perizinan dan non perizinan yang dilayani PTSP PDPPM / 5 X 100%	100%	2014	20	40	100
		Jumlah jenis perizinan dan non perizinan yang dilayani PTSP PDPPM.			1	2	5
		- Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri			0	0	1
		- Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri			1	1	1
		- Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri			0	1	0
		- Perpanjangan RPTKA yang bekerja di lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota			0	0	0
		- Perpanjangan IMTA yang bekerja di lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota			0	0	0
	b. Pelayanan Penanaman Modal adalah Pemberian segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kotasesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan	Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PDKPM di tingkat Kabupaten Rumus: Jumlah jenis perizinan dan non perizinan yang dilayani PTSP PDKPM / 6 X 100%	100%	2014	0	0	0

No	Bidang/Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi Pencapaian Target (2012)		
					2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Jumlah jenis perizinan dan non perizinan yang dilayani PTSP PDPKM / 6 X 100%			0	0	0
		- Jumlah Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri					
		- Jumlah Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri					
		- Jumlah Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri					
		- Jumlah TDP					
		- Jumlah SIUP					
		- Jumlah Perpanjangan IMTA yang bekerja di lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota					
9.5	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal adalah melaksanakan pemantauan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan	Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha Satu Kali dalam Setahun.	1 (satu) kali/ tahun	2014	3 kali	4 kali	4 kali
	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE): Rumus : Jumlah Jenis Pelayanan yang dilayani menggunakan SPIPISE / 4 x 100%	100%	2014	25	25	50
		Jumlah Jenis Pelayanan yang dilayani menggunakan SPIPISE			1	1	2
		- Jumlah Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri.			0	0	1
		- Jumlah Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri			0	0	0
		- Jumlah Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri.			0	0	0
		- Jumlah Laporan			1	1	1

No	Bidang/Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi Pencapaian Target (2012)		
					2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).					
9.7	Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal.	Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	1 (satu) kali/ tahun	2014	10 kali	10 kali	10 kali

Sumber : Hasil Analisis

2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

a. Pekerjaan Umum

Jalan nasional di NTB sepanjang 632,17 kilometer yang merupakan bagian dari jalur trans nasional Banda Aceh-Atambua, pada tahun 2009 dalam kategori mantap sebesar 72,43 % menjadi 99,96 % pada tahun 2012. Jalan provinsi pada tahun 2009 sebesar 45,40 % menjadi 66,02 % pada tahun 2012

Tabel 2.42
Kondisi Kemantapan Jalan Tahun 2008-2012

Jalan	2008	2009	2010	2011	2012
Nasional	76.42	72.43	76.74	85.57	99.66
Provinsi	44.73	45.40	46.32	53,15	66.02

Sumber: Dinas PU 2012 Provinsi NTB, 2012

Demikian pula dengan kondisi prasarana sumberdaya air, tahun 2011 jumlah bendung di Provinsi NTB sebanyak 379 buah meningkat menjadi 381 buah pada tahun 2013, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.43
Kondisi Sarana Prasarana Sumberdaya Air Tahun 2009 – 2012

No	Infrastruktur	Satuan	Tahun			
			2009	2010	2011	2012
1	Bendung	Bh	345	370	379	381
2	Bendungan	Bh	9	9	9	9
3	Embung (Embung Skala Bendungan)	Bh	166 (40)	260	248	250

No	Infrastruktur	Satuan	Tahun			
			2009	2010	2011	2012
4	Embung Rakyat/Embung Peternakan	Bh	2,028	2,400	2,279	2,284
5	Saluran Suplesi/Interkoneksi	Km	50.50	35.50	35.50	35.50
6	Luas Sawah Irigasi Potensial (Fungsional dan DI)	Ha	210,735	276,801	210,285 (178.471; 354 DI)	210,285 (178.471; 354 DI)
	-Irigasi PU < 1000 Ha	Ha	97,528	136,587	97,601 (79.908; 304 DI)	97,601 (79.908; 304 DI)
	- Irigasi PU 1000-3000 Ha	Ha	71,461	71,968	69,505 (59.514; 40 DI)	69,505 (59.514; 40 DI)
	- Irigasi PU > 3000 Ha	Ha	41,746	68,246	43,179 (39.409; 10 DI)	43,179 (39.409; 10 DI)
7	Luas Sawah Irigasi Non PU	Ha	25,281	25,281	100,600	100,600
8	Luas Tadah Hujan	Ha	35,193	Na	58,159	58,159
9	Jaringan Irigasi Lahan Kering	Ha	3.904,5	90,000	91,945	92,260
10	Pompa Air Tanah (JIAT)	Bh	479	470 (8.000)	502 (10.247)	506 (10,462)

Sumber: Dinas PU Provinsi NTB Tahun 2012

Cakupan layanan air bersih perkotaan maupun perdesaan terus menunjukkan peningkatan mulai tahun 2010 sampai dengan 2012. Cakupan pelayanan air bersih di Provinsi NTB sudah mencapai 73,91%, yang terdiri atas : perkotaan mencapai 79,35% dari 81% yang bila dibandingkan terhadap kondisi tahun 2008 mencapai peningkatan 5,35% atau sudah 76,42%, cakupan pelayanan air bersih perdesaan baru mencapai 71,42% % dari 75% atau mencapai peningkatan 6,42% dari kondisi tahun 2008 atau 64,20% dari target.

Tabel 2.44
Cakupan Air Bersih Tahun 2008-2012

Air Bersih	2008	2009	2010	2011	2012	Target RPJMD
Perkotaan	74.00	75.56	76.85	78.30	79.35	75.00
Perdesaan	65.00	66.23	69.00	70.25	71.42	75.00

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB Tahun 2012

b. Perumahan

Dari total jumlah rumah sebanyak 1.045.648 unit, jumlah rumah layak huni meningkat dari tahun 2011 sebanyak 734.794 unit menjadi 759.361 unit pada tahun 2012 dengan distribusi per Kabupaten/Kota sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.45
Proporsi Jumlah Lingkungan Layak Huni Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2012

No	Kabupaten	Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah Rmh (unit)	Jumlah rumah Tangga (RT)	Jumlah Rumah Layak Huni (Unit)	Jumlah Lingkung an Kumuh (Ha)	Jumlah Backlog (KK/Unit)	Ket
1	2	3	4	5	7	8	9	
1	Lombok Barat	599,986	180,761	182,330	137,132	594.98	1,569	
2	Lombok Tengah	860,209	188,033	256,978	116,445	430	68,945	
3	Lombok Timur	1,105,582	304,151	324,427	223,893	315	20,276	
4	Sumbawa	415,789	72,265	108,363	43,050	472	36,098	
5	Dompu	218,973	52,656	53,245	34,800	25	589	
6	Bima	439,228	95,602	110,230	74,065	24	14,628	
7	Sumbawa Barat	114,951	22,263	29,273	18,495	15	7,010	
8	Kota Mataram	402,843	56,700	110,175	51,911	25	53,475	
9	Kota Bima	142,579	19,659	35,572	20,402	15	15,913	
10	Lombok Utara	200,072	53,558	55,547	39,168	260	1,989	
	Jumlah	4,500,212	1,045,648	1,266,140	759,361	2,176	220,492	

Sumber : Sumber : Hasil Analisis

Sementara itu, penduduk yang mendapat akses sanitasi pada tahun 2008 sebesar 42,26% atau sebanyak 1,811,261 jiwa meningkat pada tahun 2014 sebanyak 2.294,920 jiwa atau 50,13%, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.46
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi
Tahun 2008 s.d. 2012
Provinsi Nusa Tenggara Barat

No.	Uraian	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah penduduk yang mendapatkan akses sanitasi	1.811.261	2.078.457	2.145.175	2.210.349	2.294.920

No.	Uraian	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
2	Jumlah penduduk	4.286.196	4.363.756	4.434.012	4.505.400	4.577.937
3	Persentase penduduk berakses sanitasi (%)	42,26	47,63	48,38	49,06	50,13
4	Jumlah rumah berakses sanitasi	452.815	519.614	536.294	552.587	573.730

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum

Tabel 2.47
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2008 – 2012
Provinsi Nusa Tenggara Barat

No	Kab/Kota	Tahun														
		2008			2009			2010			2011			2012		
		Jumlah Rumah Tinggal	Jumlah Rumah Tinggal Berakses Sanitasi	%	Jumlah Rumah Tinggal	Jumlah Rumah Tinggal Berakses Sanitasi	%	Jumlah Rumah Tinggal	Jumlah Rumah Tinggal Berakses Sanitasi	%	Jumlah Rumah Tinggal	Jumlah Rumah Tinggal Berakses Sanitasi	%	Jumlah Rumah Tinggal	Jumlah Rumah Tinggal Berakses Sanitasi	%
1	Lombok Barat	201,976	72,106	35.70	150,806	64,399	42.70	153,309	66,276	43.23	155,799	68,598	44.03	158,329	72,309	45.67
2	Lombok Tengah	208,872	85,032	40.71	211,026	98,570	46.71	214,169	101,259	47.28	217,668	102,870	47.26	221,225	107,007	48.37
3	Lombok Timur	264,967	122,228	46.13	267,122	138,529	51.86	270,059	140,836	52.15	274,487	144,259	52.56	278,987	147,985	53.04
4	Sumbawa	101,313	43,524	42.96	103,467	51,382	49.66	105,188	53,099	50.48	106,878	54,700	51.18	108,596	56,568	52.09
5	Dompu	51,142	15,496	30.30	53,296	19,347	36.3	54,370	20,351	37.43	55,217	21,054	38.13	56,077	22,055	39.33
6	Bima	101,957	32,096	31.48	104,112	39,021	37.48	105,052	40,434	38.49	106,740	41,863	39.22	108,456	44,185	40.74
7	Sumbawa Barat	22,610	7,861	34.77	24,764	9,353	37.77	25,272	9,634	38.12	25,636	10,106	39.42	26,006	10,459	40.22
8	Kota Mataram	88,406	64,572	73.04	90,561	70,674	78.04	93,877	73,912	78.73	95,379	76,256	79.95	96,906	78,349	80.85
9	Kota Bima	30,307	9,901	32.67	32,461	11,579	35.67	33,073	12,829	38.79	33,567	14,561	43.38	34,067	15,484	45.45
10	Lombok Utara	-	-		53,325	16,760	31.43	54,135	17,664	32.63	54,979	18,319	33.32	55,835	19,330	34.62
	Jumlah	1,071,549	452,816	42.26	1,090,939	519,614	47.63	1,108,503	536,294	48.38	1,126,350	552,587	49.06	1,144,484	573,730	50.13

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum

c. Penataan Ruang

Provinsi NTB telah memiliki PERDA Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Demikian pula halnya dengan 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota se-NTB juga memiliki Perda RTRW Kabupaten/Kota, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.48
Perda RTRW Provinsi dan Perda RTRW Kabupaten/Kota se- NTB

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	NOMOR DAN TAHUN PERDA
Nusa Tenggara Barat	NO. 3 TAHUN 2010
Kota Mataram	NO. 12 TAHUN 2011
Kota Bima	NO. 4 TAHUN 2012
Kabupaten Lombok Barat	NO. 11 TAHUN 2011
Kabupaten Lombok Tengah	NO. 7 TAHUN 2011
Kabupaten Lombok Timur	NO. 2 TAHUN 2012
Kabupaten Lombok Utara	NO. 9 TAHUN 2011
Kabupaten Sumbawa	NO. 10 TAHUN 2012
Kabupaten Sumbawa Barat	NO. 2 TAHUN 2012
Kabupaten Dompu	NO. 2 TAHUN 2012
Kabupaten Bima	NO. 9 TAHUN 2011

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB Tahun 2012

d. Perencanaan Pembangunan

Proses Perencanaan Pembangunan Daerah telah dilaksanakan dengan baik dan lancar mulai dari Rapat kerja kepala Bappeda Provinsi dengan kepala Bappeda kabupaten/Kota se NTB, Forum SKPD, Pra Musrenbang Provinsi, Musrenbang Provinsi, Musrenbang nasional dan Pasca Musrenbang Nasional. Disamping itu berbagai tugas perencanaan lainnya seperti penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Akhir Tahun Anggaran, Penyusunan Buku Profil Daerah, Buku NTB Dalam Angka, Buku Data Pokok, Buku PDRB, Buku Program PDT Tahun 2009, Master Plan pengembangan Industri Kreatif NTB, *Strategi Participatory Integrated Development in Rainfed Areas* (PIDRA) serta penyusunan studi – studi lainnya yang mendukung proses perencanaan dalam rangka perwujudan sasaran dan tujuan dari RPJMD tahun 2009 – 2013.

Telah diselenggarakan pula berbagai kegiatan strategis yang dihayatkan dalam rangka percepatan pembangunan daerah di segala bidang, antara lain :

- a. Mengembangkan kerjasama dengan Utrech University Belanda dalam bidang Good Governance dalam bentuk pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas sumberdaya perencana daerah yang dilakukan di dalam negeri maupun Negara Belanda.
- b. Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang diketuai oleh Wakil Gubernur ditingkat Provinsi dan Para Wakil Bupati/Wakil Walikota di Tingkat kabupaten/Kota. Pada tahun 2012 angka kemiskinan NTB menjadi sebesar 18,02%, jumlah ini menurun dari kondisi tahun 2008 sebesar 23,81%. Pada tahun 2011 Pemerintah Provinsi NTB mendapatkan penghargaan nasional terkait dengan keberhasilan menurunkan angka kemiskinan lebih dari 1%.
- c. Sesuai amanat Inpres Nomor 1 Tahun 2010 tentang percepatan pelaksanaan pembangunan Nasional dan Inpres Nomor 3 Tahun 2010 tentang program pembangunan berkeadilan telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target Millenium Development Goals (RAD-MDGs) Provinsi NTB Tahun 2011–2015.
- d. Pada tahun 2011 Pemerintah Indonesia melalui Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat telah bekerja sama dengan Asian Development Bank (ADB Loan 1964-IND Package C.2.46) Sustainable Capacity Building for Decentralization Project/SCBDP yang bertujuan untuk melakukan penguatan kelembagaan kapasitas dan sistim yang terdiri dari: 1) Pembuatan Regulasi, 2) Sistim informasi, melalui aplikasi SIPPD (Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah) , KUA-PPAS, GIS, Simpeg dan Simonev. 3) Peningkatan Kapasitas Aparatur melalui Diklat. Salah satu program yang diharapkan untuk mengoptimalkan perencanaan pembangunan daerah adalah melalui sistem informasi berbasis internet/Sistim Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) dengan sasaran mengkoordinasikan perencanaan SKPD dalam rangka menyelaraskan program/kegiatan di Kabupaten/Kota dengan Provinsi.
- e. Implementasi Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2011 Tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) di Provinsi NTB.
- f. Penetapan Lombok (Rinjani) sebagai Aspiring Geopark secara Nasional oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI.

e. Perhubungan

Bandara Internasional Lombok mulai beroperasi yang ditandai dengan kedatangan penerbangan pertama dari Bandara Soekarno Hatta Jakarta ke Bandara Internasional Lombok (BIL) pada tanggal 1 Oktober 2011. Pada tahun 2008 maskapai yang beroperasi sebanyak 8 dengan 26 flight atau 52 pergerakan pesawat sedangkan sampai dengan tahun 2012 telah beroperasi 11 maskapai penerbangan. Tingkat aksesibilitas ked an dari Provinsi NTB, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.49
Perkembangan Frekuensi Penerbangan Domestik dan Internasional dan Interkoneksi Angkutan Umum Tahun 2008-2012

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA						
		KONDISI TAHUN 2007	2008	2009	2010	2011	2012	TARGET TAHUN 2013
Maskapai/frekuensi penerbangan domestik dan internasional yang melayani rute Prov. NTB	- Perusahaan - Kali	8	8/12	8/18	8/23	8/26	11/38	14/24

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Provinsi NTB Tahun 2012

Tabel 2.50
Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan, Ijin Trayek dan Uji KIR

No.	Angkutan		Ijin dan Uji Kendaraan			Jumlah Terminal	Jumlah Pelabuhan Laut	Jumlah Pelabuhan Penyebrangan	Jumlah Bandar Udara
	Jumlah Angkutan Darat	Jumlah Penumpang Angkutan Darat	Jumlah Ijin Trayek yang dikeluarkan	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	Biaya Pengujian Kelaikan Angkutan Umum				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	417 Kendaraan (AKDP)	8909 Org	123 Perusahaan (417 Kendaraan)	10 Unit	Tergantung dari Perda Masing-masing Kabupaten/Kota	Ada 8 Terminal	Ada 8 Pelabuhan Laut	Ada 3 Pelabuhan Penyebrangan	ada 3 (tiga) Bandara
2						1. Terminal Mandalika	1. Lembar	1. Penyebrangan Lembar	1. Bandara Internasional Lombok (BIL)

No.	Angkutan		Ijin dan Uji Kendaraan			Jumlah Terminal	Jumlah Pelabuhan Laut	Jumlah Pelabuhan Penyebrangan	Jumlah Bandar Udara
	Jumlah Angkutan Darat	Jumlah Penumpang Angkutan Darat	Jumlah Ijin Trayek yang dikeluarkan	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	Biaya Pengujian Kelaikan Angkutan Umum				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3						2. Terminal Tanjung	2. Badas	2. Penyebrangan Kayangan-Pototano	2. Bandara Sultan Kaharuddin Sumbawa
4						3. Terminal Praya	3. Bima	3. Penyebrangan Sape	3. Bandara Sultan Salahuddin Bima
5						4. Terminal Pancor	4. Calabai		
6						5. Terminal Sumer Payung	5. Kempo		
7						6. Terminal Ginte	6. Carik		
8						7. Terminal Taliwang	7. Labuan Lombok		
9						8. Terminal Dara	8. Sape		

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Provinsi NTB

f. Lingkungan Hidup

Sumber mata air berhasil diselamatkan pada akhir tahun 2013 sebanyak 336 titik meningkat dari tahun 2008 yang berjumlah 174 titik, demikian pula terhadap kabupaten kota yang memiliki ruang terbuka hijau, sampai tahun 2013 10 kabupaten/kota telah memiliki ruang terbuka hijau > 30%, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.51
Capaian Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup
Tahun 2008 – 2012

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
Sumber Mata Air	Sumber	174	214	284	305	321	336
Ruang Terbuka Hijau >30 %	Kab/Kota	0	1	2	8	8	10

Sumber: BLHP Provinsi NTB Tahun 2012

Dari data proporsi penduduk yang mendapatkan akses air minum sepanjang kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah

penduduk yang terakses air minum dari 40,96% tahun 2008 menjadi sebesar 52,31% tahun 2013. Adapun rekapitulasi dan rincian jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum per kabupaten, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.52
Proporsi Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum dan Jumlah
Penduduk Tahun 2008 s.d. 2012
Provinsi Nusa Tenggara Barat

No.	Uraian	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum	1.755.706	1.963.254	2.130.543	2.228.371	2.394.719
2	Jumlah penduduk	4.286.196	4.363.756	4.434.012	4.505.400	4.577.937
3	Persentase penduduk berakses air minum (%)	40,96	44,99	48,05	49,46	52,31

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB, 2012

Tabel 2.53
Data Pelayanan Air Minum PDAM
Sampai dengan Tahun 2012

No.	Nama PDAM	Daerah Pelayanan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	
			Administratif	Pelayanan
1	PDAM Giri Menang Mataram	Mataram, Lombok Barat dan Lombok Utara	1.232.934	1.232.934
2	PDAM Lombok Tengah	Lombok Tengah	856.675	534.361
3	PDAM Lombok Timur	Lombok Timur	1.136.776	283.231
4	PDAM Sumbawa Barat	Sumbawa Barat	117.501	33.798
5	PDAM Sumbawa	Sumbawa	419.989	223.445
6	PDAM Dompu	Dompu	222.498	102.305
7	PDAM Bima	Kab. Bima dan Kota Bima	593.507	285.851

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, 2012

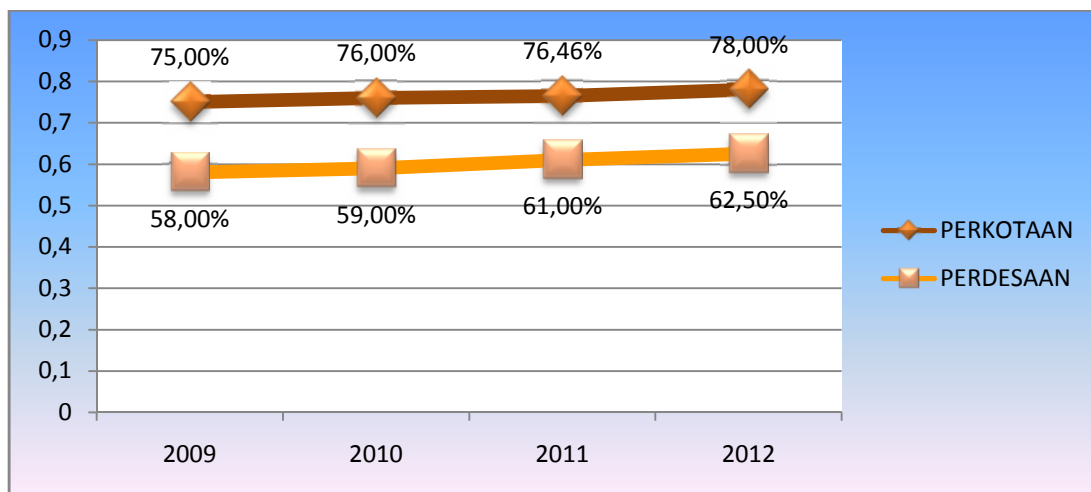
Tabel 2.54
Proporsi Jumlah Penduduk Yang Mendapatkan Akses Air Minum
Tahun 2008 – 2012

No	Kab/Kota	Tahun														
		2008			2009			2010			2011			2012		
		Jumlah penduduk	Jumlah Penduduk yang mendapat Akses Air Minum	%	Jumlah penduduk	Jumlah Penduduk yang mendapat Akses Air Minum	%	Jumlah penduduk	Jumlah Penduduk yang mendapat Akses Air Minum	%	Jumlah penduduk	Jumlah Penduduk yang mendapat Akses Air Minum	%	Jumlah penduduk	Jumlah Penduduk yang mendapat Akses Air Minum	%
1	Lombok Barat	807,905	275,011	34.04	603,223	223,434	37.04	613,237	259,706	42.35	623,195	270,778	43.45	633,315	292,971	46.26
2	Lombok Tengah	835,487	303,783	36.36	844,105	332,388	39.38	856,675	368,542	43.02	870,674	386,753	44.42	884,902	419,532	47.41
3	Lombok Timur	1,059,868	464,328	43.81	1,068,486	521,528	48.81	1,080,237	552,109	51.11	1,097,947	574,007	52.28	1,115,948	623,703	55.89
4	Sumbawa	405,251	190,387	46.98	413,869	219,268	52.98	420,750	225,270	53.54	427,512	231,455	54.14	434,384	242,126	55.74
5	Dompu	204,567	61,882	30.25	213,185	70,884	33.25	217,479	76,118	35.00	220,867	85,454	38.69	224,309	96,116	42.85
6	Bima	407,828	162,234	39.78	416,446	190,649	45.78	420,207	211,700	50.38	426,960	218,091	51.08	433,823	231,748	53.42
7	Sumbawa Barat	90,438	33,299	36.82	99,056	42,416	42.82	101,089	46,562	46.06	102,545	48,524	47.32	104,022	51,096	49.12
8	Kota Mataram	353,625	229,711	64.96	362,243	257,772	71.16	375,506	276,412	73.61	381,517	286,639	75.13	387,626	301,510	77.78
9	Kota Bima	121,227	35,071	28.93	129,843	41,459	31.93	132,292	45,482	34.38	134,266	49,061	36.54	136,270	52,968	38.87
10	Lombok Utara	-	-		213,300	63,457	29.75	216,540	68,643	31.70	219,916	77,608	35.29	223,338	82,948	37.14
	Jumlah	4,286,196	1,755,706	40.96	4,363,756	1,963,254	44.99	4,434,012	2,130,543	48.05	4,505,400	2,228,371	49.46	4,577,936	2,394,719	52.31

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, 2012

Cakupan TPA Perkotaan pada tahun 2012 sebesar 78% meningkat dari Tahun 2008 sebesar 75% sedangkan cakupan TPA Perdesaan mencapai 62,50% pada Tahun 2012 meningkat dari cakupan pada Tahun 2008 sebesar 58%, sebagaimana gambar berikut.

Gambar 2.9
Cakupan TPA Tahun 2008-2012



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB, 2012

g. Pertanian

Data tanah teridentifikasi terlantar Tahun 2009 seluas 18.719 Ha dengan jumlah Badan Hukum sebanyak 117 Badan Hukum. Pemerintah Provinsi NTB bersama Kantor Wilayah Badan Pertanahan NTB telah mendata tanah terindikasi terlantar s/d Tahun 2012 seluas 25.022,9378 ha dengan distribusi sebagaimana tabel berikut.

Tabel. 2.55
Jumlah Luas Tanah Terindikasi Terlantar s/d Tahun 2012

NO.	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH BADAN HUKUM	LUAS BIDANG	LUAS (Ha)
1	Mataram	1	1	0,2000
2	Lombok Utara	17	26	402,9878
3	Lombok Barat	13	25	380,7333
4	Lombok Tengah	14	30	1.007,8713
5	Lombok Timur	12	15	389,5608
6	Sumbawa Barat	19	19	592,7818
7	Sumbawa	24	24	4.146,5093
8	Dompu	30	31	12.158,1908
9	Bima	13	13	5.730,7837
10	Kota Bima	3	3	213,3190
Total		146	187	25.022,9378

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTB, dan Biro Administrasi Pemerintahan Setda Provinsi NTB, Tahun 2012

Dari data tersebut, Pemerintah Provinsi NTB bersama Kanwil BPN NTB telah melaksanakan kegiatan Penertiban Tanah Terindikasi Terlantar terhadap 11 Badan Hukum seluas 744,2067 Ha dari 146 Badan Hukum pemegang hak seluas 25.022,9378 Ha. Selanjutnya dari 11 Badan Hukum yang menjadi obyek penertiban, terdapat 2 Badan Hukum yang diberikan Peringatan I seluas 119,1668 Ha dan 9 Badan Hukum lainnya masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan kegiatan sesuai dengan peruntukannya seluas 625,0399 Ha.

h. Kependudukan dan Catatan Sipil

Perekaman e- KTP tahun 2012 di Provinsi NTB sebesar 84,11% dengan pencapaian 100% telah dilakukan di kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Bima, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.56
Rekapitulasi Hasil Perekaman e-KTP Tahun 2012

No.	Kabupaten/Kota	Target Wajib KTP Nasional	Realisasi Pelaksanaan e-KTP	
			Perekaman	%
1	Mataram	239.482	223.124	93
2	Lombok Barat	446.961	301.885	68
3	Lombok Utara	151.152	127.640	84
4	Lombok Tengah	433.275	434.924	100
5	Lombok Timur	612.645	474.104	77
6	Sumbawa Barat	96.902	72.919	75
7	Sumbawa	310.621	256.305	83
8	Dompu	168.207	126.524	75
9	Bima	89.596	82.166	92
10	Kab. Bima	263.833	265.420	100
Total		2.811.674	2.365.011	84,11

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2012

i. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah lingkup Pemerintah provinsi NTB tahun 2012 sebesar 35,97%, partisipasi perempuan di lembaga swasta adalah 22,57%. Data tahun 2013 (semester I) jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang teridentifikasi se-NTB adalah sebanyak 227 kasus (46,61%). Rasio partisipasi angkatan kerja perempuan Tahun 2012 adalah 94,84%.

j. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Pada tahun 2012, jumlah akseptor KB (jumlah pasangan usia subur) adalah 1.019.730 dengan peserta KB aktif sebanyak 622.934 (61,09%), sementara yang teridentifikasi sebagai keluarga pra KS dan KS sebanyak 674.880 keluarga atau rasionya 66,18%.

k. Sosial

Penanganan masalah kesejahteraan sosial selama tahun 2009-2012 dilaksanakan melalui pendekatan dalam panti maupun luar panti, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.57
Kapasitas Daya Tampung Panti Tahun 2009-2012

NO.	NAMA PANTI	DAYA TAMPUNG	REALISASI			
			2009	2010	2011	2012
1.	Rumah Perlindungan Petirahan Sosial Anak (RPPSA) Putra Utama Selat Narmada	50/bulan	648	648	648	540
2.	Panti PSBL Suka Waras Selebung Loteng	100/tahun	100	100	100	100
3.	Panti PSBK Aikmel Lombok Timur	100/6 bulan	200	200	200	200
4.	Panti Sosial Tresna Wredha (PSTW) Puspa Karma Mataram	100/tahun	85	84	84	75
5.	Panti Sosial Tresna Wredha (PSTW) Meci Angi Bima	50/tahun	50	50	50	50
6.	Panti PSAA Harapan Mataram	100	100	80	80	80
7.	Panti Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Karya Putra Bengkel Lobar	75	75	75	70	75
8.	Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Budi Rini Selagalas Mataram	50	123	93	103	100

Sumber: Dinas Sosial kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTB Tahun 2012

Sedangkan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) luar panti dari jumlah PMKS secara keseluruhan sebanyak 1.028.606 yang sudah tertangani sebanyak 171.550 atau 16.68%, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.58
Perkembangan Penyandang Masalah Sosial Masyarakat
Tahun 2009-2012

NO.	INDIKATOR	SATUAN	2009	2010	2011	2012
1.	Anak Terlantar	Jiwa	200.630	201.699	205.116	205.116
2.	Anak Jalanan	Jiwa	10.181	10.005	3.327	3.327
3.	Penyandang cacat	Jiwa	397.569	161.147	28.690	16.098
4.	Tuna Susila	Jiwa	446	440	508	508
5.	Pengemis	Jiwa	558	339	274	274
5.	Gelandangan	Jiwa	651	1.275	1.746	1.746
6.	Korban Napza	Jiwa	2.238	1.530	2.707	2.707
7.	Keluarga Fakir Miskin	KK	451.353	434.893	373.750	373.750
8.	Keluarga Berumah Tidak Layak Huni	KK	117.492	178.904	172.825	172.825
9.	Komunitas Adat Terpencil (KAT)	KK	8.938	6.432	9.091	2.758
10.	Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA)	Jiwa	3	3	-	708

Sumber: Dinas Sosial kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTB Tahun 2012

I. Ketenagakerjaan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik NTB dengan jumlah penduduk NTB pada tahun 2012 adalah sebanyak 4.587.562 jiwa terdapat 3.163.692 jiwa termasuk penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). Dari jumlah penduduk usia kerja tersebut, sebanyak 66,02% merupakan penduduk angkatan kerja (AK) baik itu yang terlibat aktif dalam bekerja maupun sedang mencari pekerjaan, sisanya sebanyak 31,04% adalah penduduk bukan angkatan kerja (AK) yaitu penduduk yang bersekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya.

Rasio Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi NTB pada Tahun 2012 adalah 66,02% dengan tingkat pengangguran 5,26%, hal ini menunjukkan bahwa kinerja partisipasi angkatan kerja dikategorikan baik.

Tabel 2.59
Statistik Ketenagakerjaan NTB
Tahun 2011-2012

Uraian	Tahun	
	2011	2012
2	3	4
TPAK (%)	66.12	66.02
Tingkat Pengangguran (%)	5.33	5.26
Bekerja (%)	94.67	94.74
Bekerja (Orang)	1,962,240	1,978,764
Setengah Pengangguran (Orang)	860,701	880,504
- Pengangguran Terpaksa	434,599	514,597
- Pengangguran Sukarela	426,102	365,907

Sumber : BPS Provinsi NTB

Menurut data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB tahun 2012 menunjukkan bahwa pelaksanaan pengiriman Tenaga Kerja Ke luar Negeri sebanyak 31,357 orang menurun bila dibanding pengiriman tenaga kerja pada tahun 2011 sebesar meningkat sebanyak 58.230 orang. Pengiriman terbanyak tujuan Malaysia Barat untuk Tenaga Kerja (laki-Laki) dan Negara Saudi Arabia untuk Tenaga Kerja Wanita, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.60
Rekapitulasi Perkembangan Jumlah TKI
Tahun 2009-2012

NO.	NEGARA TUJUAN	2009		JML	2010		JML	2011		JML	2012		JML
		L	P		L	P		L	P		L	P	
1.	Malaysia Barat	32.430	433	32.863	37.043	1.096	38.139	43.282	578	43.860	30.774	738	31.512
2.	Malaysia Timur	198	50	248	171	7	178	654	71	725	706	53	759
3.	Uni Emirat Arab	1	372	373	29	624	653	1	1623	1624	-	1.951	1.951
4.	Yordania	2	59	61	-	243	243	-	-	-	-	-	-

NO.	NEGARA TUJUAN	2009		JML	2010		JML	2011		JML	2012		JML
		L	P		L	P		L	P		L	P	
5.	Taiwan	-	-	-	5	98	103	22	165	187	13	236	249
6.	Hongkong	-	38	38	-	46	46	-	227	227	-	284	284
7.	Singapura	-	32	32	-	15	15	-	141	1441	-	215	215
8.	Bahrain	-	-	-	-	71	71	-	348	348	-	429	429
9.	Oman	-	215	215	-	359	359	-	346	346	-	376	376
10.	Qatar	-	75	75	-	162	162	-	391	391	-	1.069	1.069
11.	Kuwait	-	72	72	-	8	8	-	-	-	-	-	-
12.	Brunei Darussalam	-	1	1	20	35	55	22	24	46	35	30	65
13.	Libya	-	-	-	48	-	48	-	-	-	-	-	-
14.	Saudi Arabia	272	19.480	19.752	89	15.565	15.654	406	9.916	10.022	2	96	98
15.	Makau	-	1	1	-	2	2	-	-	-	-	-	-
16.	Syria	-	-	-	-	414	414	1	312	313	-	-	-
17.	Swiss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
18.	Maladewa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
19.	Timor Leste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5
20.	Austria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	6
JUMLAH		32.903	20.828	53.731	37.405	18.745	56.150	44.088	14.142	58.230	31.537	5.483	31.537

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB Tahun 2012

m. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pada tahun 2008 jumlah koperasi aktif sebanyak 2.394 koperasi dan pada Tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi 3.225, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.61
Data BPR dan Koperasi Aktif di Provinsi NTB
Tahun 2008-2012

No.	Tahun	Jumlah BPR	Jumlah Koperasi aktif
1.	2008	68	2.394
2.	2009	53	2.514
3.	2010	32	2.848
4.	2011	32	3.003
5.	2012	32	3.225

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM, 2012

n. Penanaman Modal

Perkembangan investasi di Provinsi NTB menunjukkan peningkatan. Nilai Investasi yang ditanamkan oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sampai akhir tahun 2012 sebesar Rp.614.589.000.000,- dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp. 1.163.043.000.000,-, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.62
Investasi PMDN dan PMA Tahun 2008 – 2012

Uraian	Tahun				
	2008	2009	2010	2011	2012
PMDN RP. 000)	695.000.000	749.936.490	195.025.950	160.596.385	614.589.000
PMA (US\$.000)	44.062	56.757	145.688	164.575,69	129.227
*PMA DALAM RP.000	396.558.000	510.813.000	1.311.192.000	1.481.181.183	1.163.043.000
Total	1.091.558.000	1.260.749.490	1.506.217.950	1.641.777.568	1.777.632.000

Sumber : BKPM & PT Provinsi NTB Tahun 2012

Laju pertumbuhan investasi PMDN pada tahun 2009 sebesar 7,90% dan menjadi 359,92% pada tahun 2012. Sedangkan laju pertumbuhan investasi PMA, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.63
Pertumbuhan Investasi PMDN dan PMA
Tahun 2009 – 2012

Uraian	Tahun			
	2009	2010	2011	2012
PMDN (%)	7.90	(73.99)	(17.65)	282,69
PMA (%)	28.81	156.69	12.96	(21,48)
Total	15.50	19.47	9.00	8.28

Sumber : BKPM & PT Provinsi NTB Tahun 2012

o. Kebudayaan

Inventarisasi situs cagar budaya tidak bergerak yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terhimpun selama tahun 2012 sebanyak 377 situs cagar budaya. Bentuk-bentuk cagar yang terinventarisasi antara lain makam, situs, relief, benteng, rumah tradisional, megalitik, batu, rumah adat, sumur, bangunan bekas istana, gua, bangunan colonial, bangunan pertahanan, monumen/tugu, pura, taman, kemalik, masjid dan lain-lain.

p. Kepemudaan dan Olahraga

Penyelenggaraan kompetisi berbagai cabang olahraga pelajar dan mahasiswa, baik di event nasional maupun internasional menunjukkan peningkatan prestasi yang menggembirakan dan mengangkat nama NTB diajang nasional dan mengharumkan nama bangsa ditingkat internasional yang dibuktikan dengan perolehan medali dalam berbagai kejuaraan olahraga pelajar seperti POPNAS, POPWIL, Kejuaraan nasional antar Pelajar, Kejuaraan Sirkuit Yuniior, Grand Jatim Sprint dan Asean School & Asean Yuniior di Singapura, serta Arafura Youth Games di Australia ditingkat Internasional, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.64
Prestasi Atlet Tahun 2009 – 2012

Tahun	Event	Jenis Lomba	Emas	Perak	Perunggu	Keterangan
2009	Nasional	Atletik	4	7	5	POPNAS X di Yogyakarta dan Kejurnas Atletik antar PPLP di Belitung
		Pencak Silat	4	2	2	POPNAS X di Yogyakarta dan Kejurnas Pencak Silat antar PPLP di Jakarta
		Voli	1	0	1	Kejurnas Voli Pantai U17 di Jatim dan Kejurnas KOP Bola Voli di Solo Jateng
	Internasional	Atletik	1	2	1	ASEAN School di Singapura
		Voli	1	0	0	Arafura Youth Games di Australia
2010	Nasional	Atletik	4	1	3	Kejurnas Atletik antar PPLP di Ambon
		Pencak Silat	0	3	2	POPNAS X di Yogyakarta, POPWIL dan Kejurnas Pencak Silat antar PPLP di Jakarta
2011	Nasional	Atletik	10	9	4	Sirkuit Junior dan SMP Jakarta, Grand Jatim Sprint dan PORNAS Riau
		Pencak Silat	1	0	0	POPNAS Riau
	Internasional	Atletik	1	2	4	ASEAN School di Singapura dan ASEAN Junior
2012	Nasional	Atletik	4	26	12	Kejurnas antar PPLP, Kejurnas Remaja, Jabar Open
		Pencak Silat	1	2	6	Kejurnas antar PPLP, Kejurnas Junior
	Internasional	Atletik	2	2	3	Arafura Youth Games di Singapura dan ASEAN School Games di Laos

Sumber : Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Prov. NTB, 2009-2012

q. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Selama kurun waktu 2009-2012 kondisi ketertiban, keamanan dan politik di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.65
Konflik, Partisipasi Politik dan Penegakan Hukum di Provinsi NTB
Tahun 2009-2012

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN							
			2009		2010		2011		2012	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Konflik Vertikal	Kasus	138	107	124	96	112	61	98	43
2.	Konflik Horizontal	Kasus	104	82	76	65	59	36	49	50
3.	Partisipasi masyarakat dalam Politik	%	70	75,70 (Pilpres)	68	73,42 (Pemilukada)	68	Tidak ada Pemilu/Pemilukada	68	Tidak ada Pemilu/Pemilukada
4.	Pemilu yang bebas dan adil	Pelanggaran	58	9	60	3	Tidak ada Pemilu		Tidak ada Pemilu	
5.	Pelanggaran Hukum dan HAM	Kasus	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kriminalitas	Kasus	6.950	4.595	7.200	5.551	7.430	6.082	7.662	4.867

Sumber: Bakesbangpoldagri Prov. NTB, BPBD Prov. NTB Tahun 2012.

r. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi, Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Beberapa keberhasilan yang telah diperoleh antara lain pembentukan Pokja akuntansi keuangan dan barang, pembentukan SIMDA barang milik daerah (BMD), kerjasama dengan KPKNL dalam penilaian aset daerah, kerjasama dengan Inspektorat untuk pemutakhiran data aset dengan cara melakukan cek fisik, penyusunan regulasi yang berkaitan dengan Pengelolaan Aset melalui Peraturan Gubernur, Instruksi Gubernur, Keputusan Gubernur. Penatausahaan aset melalui Inventarisasi, validasi dan rekonsiliasi aset, Pengamanan dan Pemeliharaan Aset melalui sertifikasi aset dan penilaian aset yang dikelola pihak ketiga, rekonsiliasi nilai saldo awal barang milik daerah Tahun 2009 dan Tahun 2010 sebagai data awal Penyusunan Neraca Tahun 2011 dengan melibatkan semua Pengurus Barang pada masing-masing SKPD /UPTD.

Jumlah Peraturan Daerah meningkat dari 10 buah pada tahun 2009 menjadi 42 buah pada tahun 2012, sedangkan jumlah Peraturan Gubernur meningkat dari 44 buah pada tahun 2009 menjadi 180 buah pada tahun 2012 dan jumlah Keputusan Gubernur meningkat dari 629 buah pada tahun 2009 menjadi 659 buah pada tahun 2012, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.66
Target dan Realisasi Legislasi Daerah 2009-2013

PRODUK HUKUM	2009		2010		2011		2012	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1. Peraturan Daerah	2	10	4	10	6	14	8	8
2. Peraturan Gubernur	20	44	35	36	37	47	37	51
1. Keputusan Gubernur	400	629	600	722	650	683	650	659
Jumlah	430	683	647	768	710	744	710	718

Sumber: Biro Hukum Setda NTB, 2012

s. Ketahanan Pangan

Cadangan pangan pemerintah dan masyarakat tahun 2010 sebanyak 594,92 ton meningkat pada tahun 2012 mencapai 1.161,85 ton (109,61%) melampaui target 1.060 ton. Ketersediaan energi tahun 2012 mencapai 4.354,24 Kalori/kapita/hari meningkat 41,48% dari kondisi tahun 2011 dan ketersediaan protein meningkat 38,1% dari kondisi tahun 2010 menjadi 129,54 gr/kapita/hari di tahun 2012, melampaui target tahun 2012 untuk energi 3.099,80 Kalori/kapita/hari dan protein 102,29 Gr/kapita/hari di dalam RPJM Provinsi NTB, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.67
Capaian Ketahanan Pangan Provinsi NTB
Tahun 2008-2013

No	Indikator RPJMD	Uraian	Kondisi 2008	Capaian					Peningkatan Per tahun (%)
				2009	2010	2011	2012	2013	
1	Pola Pangan Harapan (PPH)	Target		74,20	75,70	77,20	78,70	80,30	1,99
		Realisasi	72,70	73,40	74,08	76,70	78,10	78,70	1,77
		(%)		98,92	97,86	99,35	99,24	98,01	
2	Desa Mandiri Pangan (Desa)	Target		102	132	162	192	222	21,57
		Realisasi	82	102	138	169	199	229	22,65
		(%)		100,00	104,55	104,32	103,65	103,15	
3	Cadangan Pangan (Ton)	Target	-	265	530	795	1.060	1.325	52,08
		Realisasi		521,00	594,92	798,55	1.161,85	1.373	28,02
		(%)		196,60	112,25	100,45	109,61	103,62	
	- Ketersediaan Energi (Kalori/Kapita/Hari)	Target		3.083,12	3.088,67	3.094,23	3.099,80	3.105,38	0,18
		Realisasi	3.077,58	3.367,97	3.559,25	3.343,04	4.354,24	4.397,78*)	7,71
		(%)		109,24	115,24	108,04	140,47	141,62	
	- Ketersediaan Protein (gr/Kapita/Hari)	Target		95,85	97,95	100,10	102,29	104,53	2,19
		Realisasi	93,80	111,90	117,08	114,49	129,54	130,84*)	4,14
		(%)		116,74	119,53	114,38	126,64	125,17	

Sumber : LKPJ AMJ 2013

t. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Penemuan dan pengembangan teknologi tepat guna (TTG) yang telah dihasilkan sampai dengan Tahun 2012 sebanyak 183 jenis. Dari temuan tersebut yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat lebih dari 75%, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.68
Pemanfaatan TTG di Provinsi NTB Tahun 2008-2012

NO	URAIAN	2008	2009		2010		2011		2012		2013
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
1	Pemanfaatan TTG	73	84	89	96	128	108	134	108	166	130
2	Temuan TTG	95	106	110	115	156	125	173	120	183	145

Sumber: BPMPD Provinsi NTB, 2012

u. Kearsipan

Badan Perpustakaan daerah dan arsip sebagai instansi penanggungjawab pelaksanaan program dan kegiatan urusan ini, selama kurun waktu lima tahun terakhir yaitu Tahun 2008 – 2012 telah banyak mendukung pembangunan di Provinsi NTB dengan keberhasilan-keberhasilan yang telah diperoleh antara lain: hasil kajian sistem administrasi kearsipan sebanyak 4 dokumen/400 eksemplar, hasil penataan dokumen/arsip daerah, akuisisi arsip dan pengolahan arsip inaktif dan statistis hasil akuisisi 40 SKPD, hasil penilaian arsip inaktif dan statistis hasil akuisisi 5 SKPD, pengolahan dan pelayanan informasi khasanah arsip yang memiliki nilai sejarah 14 jenis, pengembangan model instansi pengelola kearsipan 30 SKP, pembinaan dan pengawasan kearsipan 46 SKP dan 40 Pondok pesantren, dan pelatihan kersipan 240 Sekretaris Desa dan Pengurus Pondok Pesantren.

v. Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan data Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika sebagai instansi penanggungjawab urusan tersebut diperoleh jumlah jaringan komunikasi di Provinsi NTB, terdapat 8 operator jaringan telekomunikasi antara lain milik PT. Telkom Mataram, PT. XL Axiata Mataram, PT. Telkomsel

Mataram, PT. Indosat Mataram, PT. Smartfren Mataram, PT Axis Mataram, PT. Sampoerna Mataram dan PT. Hutchinson Mataram, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.69
Jumlah Jaringan Komunikasi Tahun 2008-2012

No.	Uraian	2008	2012
1	Jumlah jaringan telpon genggam (operator)	5	12
2	Jumlah jaringan telepon stationer (penyelenggara)	7	10
3	Jumlah jaringan telpon komunikasi 1+2	12	22

Sumber : Bidang Postel Dishubkominfo

Rasio Wartel/Warnet berdasarkan kondisi tahun 2008 terhadap penduduk adalah 1 : 1500 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.70
Rasio Wartel/Warnet per 1000 penduduk Tahun 2008 s.d. 2012

No	Kabupaten/Kota	Tahun 2008					Tahun 2012				
		Jumlah Penduduk	Jumlah Wartel	Jumlah Warnet	Rasio Wartel	Rasio Warnet	Jumlah Penduduk	Jumlah Wartel	Jumlah Warnet	Rasio Wartel	Rasio Warnet
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)/(3)	(7)=(5)/(3)	(8)	(9)	(10)	(11)=(9)/(8)	(12)=(10)/(8)
1	Kota Mataram	362.243	55	13	0,15714	0,04	413.210	12	74	0,03000	0,18500
2	Lombok Barat	603.223	3	8	0,00500	0,013	61.161	5	34	0,08333	0,55738
3	Lombok Tengah	844.105	7	5	0,00875	0,006	875.231	5	27	0,00575	0,03103
4	Lombok Timur	1.068.486	4	7	0,00400	0,007	1.123.488	4	36	0,00357	0,03273
5	Lombok Utara	413.869	12	6	0,03000	0,015	423.029	3	29	0,00714	0,06905
6	Kab. Sumbawa	213.185	20	5	0,10000	0,025	223.678	8	10	0,03636	0,04545
7	Sumbawa Barat	416.446	14	3	1,03500	0,008	447.286	5	13	0,01136	0,02955
8	Kab. Bima	99.059	8	3	0,08000	0,030	118.608	3	22	0,02542	0,18644
9	Kota Bima	213.300	0	0	0,00000	0,000	203.564	3	17	0,01500	0,08500
10	Dompu	129.843	14	5	0,11667	0,042	146.307	9	22	0,00006	0,15172
	Jumlah	4.363.759	137	55	0,00003	0,00	4.035.562	57	284	0,00001	0,00007

Sumber : Bidang Postel Dishubkominfo

Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal yang beredar di Provinsi NTB terdiri dari Surat kabar nasional sebanyak 3 media yaitu : Kompas, Tempo dan Media Indonesia, sedangkan surat kabar lokal 8 media yaitu : Lombok Post, Suara NTB, Radar, Nurani Rakyat, KSB Post, Gaung, Suara Mandiri dan Bima Express. Lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.71
Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal s.d 2012

No.	Uraian	2008	2012
1	Jumlah jenis surat kabar terbitan nasional	3	3
2	Jumlah jenis surat kabar terbitan lokal	6	8
Total surat kabar nasional dan lokal		9	11

Sumber : Bidang Postel Dishubkominfo

Jumlah penyiaran radio lokal/ TV Lokal terdiri dari radio lokal sebanyak 96 (Sembilan puluh enam) stasiun radio dan 8 (delapan) siaran Televisi Lokal. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.72
Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal Tahun 2008 s.d. 2012

No.	Uraian	2008	2012
1	Jumlah penyiaran radio lokal	78	96
2	Jumlah penyiaran radio nasional	6	8
3	Jumlah penyiaran tv lokal	6	8
4	Jumlah penyiaran tv nasional	9	11
Total penyiaran radio/tv lokal		99	123

Sumber : Bidang Postel Dishubkominfo

w. Perpustakaan

Jumlah Perpustakaan Desa/Kelurahan dan Perpustakaan Keliling pada tahun 2008 sebanyak 253 unit menjadi sebanyak 921 unit pada tahun 2012 atau meningkat 264% dari tahun 2008 dengan rata-rata perkembangan 66% atau 167 unit pertahun. Sedangkan perpustakaan desa/kelurahan pada tahun 2008 sebanyak 40 lokasi meningkat menjadi 170 unit pada tahun 2012 atau naik 325% dari tahun 2008 dengan rata-rata perkembangan 81% atau 33 lokasi pertahun;

Perpustakaan rumah ibadah pada tahun 2008 sebanyak 82 unit meningkat menjadi 708 unit pada tahun 2012 atau meningkat 763% dari tahun 2008 dengan rata-rata perkembangan 190,85% atau 157 unit pertahun.

Jumlah kunjungan ke perpustakaan pada tahun 2012 telah mencapai 933.158 orang dari kondisi awal tahun 2008 sebanyak 545.109 orang. Rata-rata kunjungan tiap tahun sebanyak 744.002 orang. Untuk

menjangkau sebanyak mungkin pemustaka dilakukan melalui pelayanan Perpustakaan Keliling dan tercatat telah terlayani 170 pos pada tahun 2012 untuk pelayanan di Pulau Lombok dan Sumbawa.

Tabel 2.73
Jumlah perpustakaan Desa, Rumah Ibadah
dan Kunjungan ke perpustakaan
Tahun 2008-2012

Indikator	Kondisi awal 2008	2009		2010		2011		2012	
		target	real	target	Real	target	real	target	real
Perpustakaan Desa	253 Unit	350	398	500	760	890	890	910	920
Perpustakaan Keliling	40 Lokasi	75	75	100	110	125	140	160	170
Perpustakaan Rumah Ibadah	82 Unit	100	108	300	308	508	508	708	708
Kunjungan ke Perpustakaan	545.109 Orang	500.000	547.631	600.000	684.000	810.000	811.219	900.000	933.158

Sumber: Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi NTB Tahun 2012

Tabel 2.74
Jumlah Pengunjung perpustakaan

Pengunjung	2010	2011	2012
Mahasiswa	432,142	586,858	642,858
Pelajar	57,398	90,222	116,523
Pegawai	37,665	60,482	80,904
Umum	51,058	71,551	90,976
TNI/Polri	1,514	2,106	1,897
Total Kunjungan	579,777	811,219	933,158

Sumber : Badan Arsip dan Perpustakaan Prov. NTB 2013

2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan

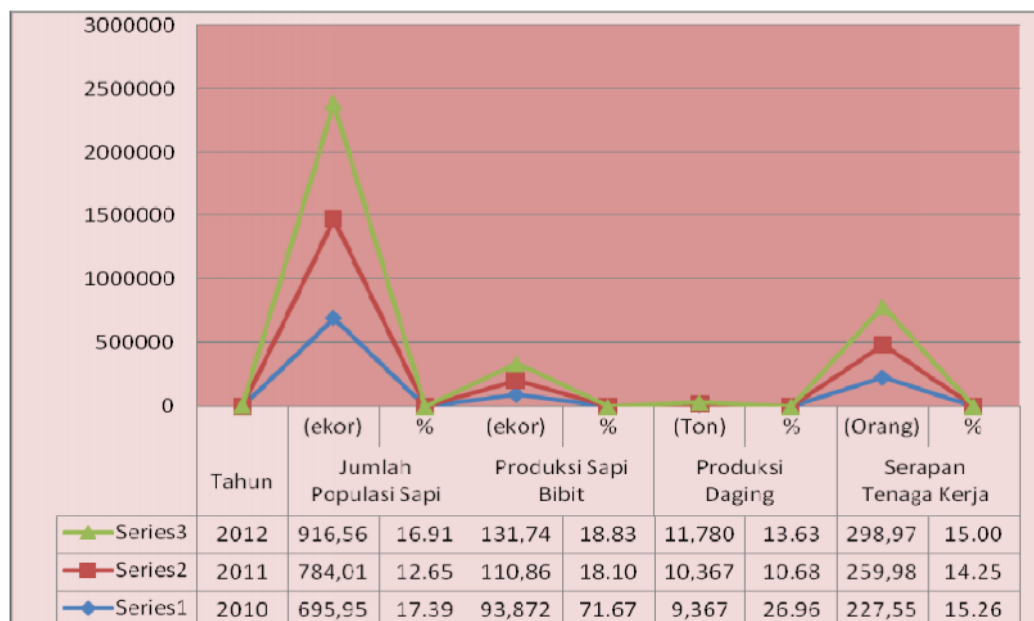
a. Pertanian

Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB masih tertinggi meskipun demikian setiap tahun mengalami penurunan seiring peningkatan kontribusi sektor lainnya. Pada tahun 2008 kontribusi sektor ini sebesar 23,56 persen, tahun 2009 sebesar 20,71 persen, tahun 2010 sebesar 20,23 persen, tahun 2011 sebesar 23,26 persen, dan pada tahun 2012 sebesar 25,69 persen. Adapun perkembangan produksi komoditi pertanian unggulan daerah sebagai berikut.

1. Sapi

Pada tahun 2010 jumlah sapi 695.951 ekor dan menjadi 916.560 ekor pada 2012, jumlah ini melampaui target populasi yang telah ditetapkan sebesar 102,09%. Perkembangan populasi sapi lihat gambar berikut.

Gambar 2.10
Populasi Sapi, Produksi Sapi Bibit, Produksi Daging dan
Penyerapan Tenaga Kerja



Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB Tahun 2012

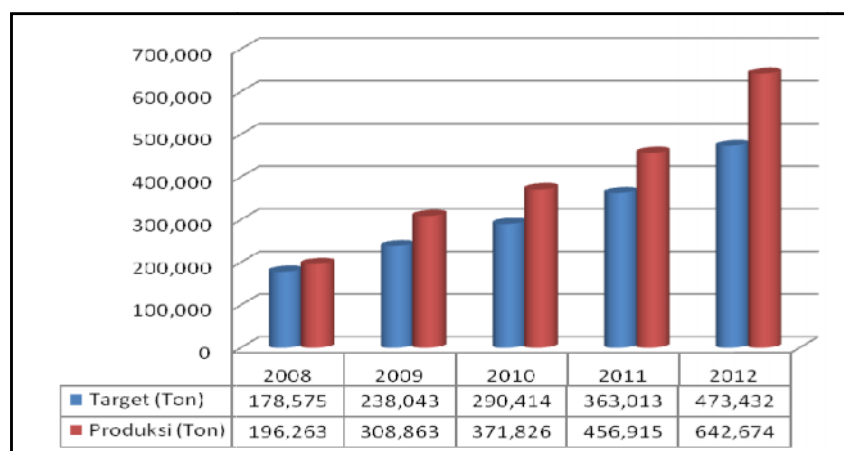
(2) Padi

Produksi padi di Nusa Tenggara Barat tiap tahunnya terus meningkat, hal ini dapat dilihat pada tahun 2008 produksi padi Nusa Tenggara Barat mencapai 1.750.677 ton dan meningkat menjadi 2.114.231 ton pada tahun 2012. Pada tahun 2008 produktivitas padi di Nusa Tenggara Barat sebesar 87,03 persen, meningkat menjadi 89,29 persen pada tahun 2012.

(3) Jagung

Produksi jagung Nusa Tenggara pada tahun 2008 mencapai 196.263 ton dan pada tahun 2012 produksi jagung menjadi 117.030 ton. Produktivitasnya pada tahun 2008 sebesar 33,22 persen, meningkat pada tahun 2012 menjadi 54,92 persen, sebagaimana tabel berikut.

Gambar 2.11
Target dan Produksi Jagung Provinsi NTB
Tahun 2008-2012



Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi NTB Tahun 2012

(4) Kedelai

Pada tahun 2008 produksi kedelai mencapai 95.106 ton, menurun pada tahun 2012 menjadi 74.156 ton. Hal ini disebabkan karena petani beralih ke tanaman tembakau terutama Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Timur yang dulunya merupakan penghasil komoditas kedelai. Produktivitas kedelai pada tahun 2008 sebesar 12,49 persen turun menjadi 11,79 persen.

(5) Kacang Tanah

Pada tahun 2008 produksi kacang tanah sebesar 32.348 ton, meningkat tahun 2012 menjadi 38.890 ton. Produktivitas kacang tanah pada tahun 2008 sebesar 12,67 persen, meningkat pada tahun 2012 menjadi 15,25 persen.

(6) Kacang Hijau, Ubi Kayu dan Ubi jalar

Perkembangan produksi tanaman pangan berupa padi, jagung, kedelai, kacang hijau, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2008 – 2012, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.75
Perkembangan Produksi Tanaman Pangan
Provinsi NTB Selama 5 Tahun

No.	KOMODITAS	CAPAIAN					
		URAIAN	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PADI	Produksi (ton)	1.750.677	1.870.775	1.774.499	2.067.137	2.114.231
		Luas Panen (Ha)	359.714	374.279	374.284	418.062	425.448
		Produktivitas (Ku/Ha)	87,03	89,62	83,59	86,00	89,29
	- PADI SAWAH	Produksi (ton)	1.557.299	1.653.811	1.620.666	1.898.279	1.900.141
		Luas Panen (Ha)	306.274	316.120	329.594	369.249	368.760
		Produktivitas (Ku/Ha)	50,85	52,32	49,17	51,41	51,53
	- PADI LADANG	Produksi (ton)	193.378	216.964	153.833	168.858	214.090
		Luas Panen (Ha)	53.440	58.159	44.690	48.813	56.688
		Produktivitas (Ku/Ha)	36,19	37,31	34,42	34,59	37,77
2	JAGUNG	Produksi (ton)	196.263	308.863	249.005	456.915	642.674
		Luas Panen (Ha)	59.078	81.543	61.593	89.307	117.030
		Produktivitas (Ku/Ha)	33,22	37,88	40,43	51,16	54,92
3	KEDELAJ	Produksi (ton)	95.106	95.846	93.122	88.100	74.156
		Luas Panen (Ha)	76.154	87.920	86.649	75.042	62.888
		Produktivitas (Ku/Ha)	12,49	10,90	10,75	11,74	11,79
4	KACANG TANAH	Produksi (ton)	32.348	38.615	33.666	37.964	38.890

		Luas Panen (Ha)	25.541	28.750	25.044	26.319	25.508
		Produktivitas (Ku/Ha)	12,67	13,43	13,44	14,42	15,25
5	KACANG HIJAU	Produksi (ton)	39.756	33.774	50.012	50.702	34.152
		Luas Panen (Ha)	40.017	34.536	45.511	45.351	27.775
		Produktivitas (Ku/Ha)	9,93	9,78	10,99	11,18	12,30
6	UBI KAYU	Produksi (ton)	68.386	85.062	70.606	75.366	79.472
		Luas Panen (Ha)	5.688	6.514	5.352	5.167	5.979
		Produktivitas (Ku/Ha)	120,23	130,58	131,92	145,86	132,92
7	UBI JALAR	Produksi (ton)	10.985	11.276	13.134	11.970	13.232
		Luas Panen (Ha)	935	969	1.123	954	1.100
		Produktivitas (Ku/Ha)	115,27	116,37	116,95	125,47	120,29

Sumber : Hasil Analisis

b. Kehutanan

Prov. NTB memiliki hutan seluas 1.071.722,83 ha (53,18% dari luas wilayah NTB) berdasarkan fungsinya dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu hutan konservasi (173.636,40 ha), hutan lindung (447.272,86 ha) dan hutan produksi (450.813,57 ha), sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.76
Data Luas Hutan Tiap Kabupaten/Kota, Menurut Fungsinya

No.	Kabupaten /Kota	Luas Wilayah (Ha)	Hutan Konservasi (Ha)	Hutan Lindung (Ha)	Hutan Produksi (Ha)		Total Luas Kawasan Hutan (Ha)
					Terbatas (HPT)	Tetap (HP)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kota Mataram	6.130,00	-	-	-	-	-
2	Lombok Barat	105.392,00	6.557,27	25.078,94	10.041,00	304,67	41.981,88
3	Lombok Utara	80.953,00	13.164	11.198,22	6.984,38	5.171,52	36.518,12
4	Lombok Tengah	120.840,00	5.824,29	9.926,14	-	4.583,89	20.334,32
5	Lombok Timur	160.555,00	27.445	31.498,67	-	5.565,00	64.508,67
6	Sumbawa	664.398,00	30.279,65	168.667,68	137.036,14	53.691,88	389.675,35
7	Sumbawa Barat	184.902,00	5.062	66.230,71	35.391,94	18.651,11	125.335,76
8	Dompu	232.455,00	29.704,5	51.482,59	32.586,78	26.119,11	139.892,98

No.	Kabupaten /Kota	Luas Wilayah (Ha)	Hutan Konservasi (Ha)	Hutan Lindung (Ha)	Hutan Produksi (Ha)		Total Luas Kawasan Hutan (Ha)
					Terbatas (HPT)	Tetap (HP)	
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Bima	438.940,00	55.599,69	82.866,11	67.190,59	44.740,03	250.396,42
10	Kota Bima	20.750,00	-	323,80	1.497,00	1.258,53	3.079,33
TOTAL		2.015.315,00	173.636,40	447.272,86	290.727,83	160.085,74	1.071.722,83

Sumber : Statistik Dinas Kehutanan Prov. NTB, Tahun 2012

Tabel 2.77

Kinerja kehutanan di Provinsi NTB tahun 2009-2013

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
1	Menurunkan lahan kritis ≤ 507.778,17 Ha	Target Realisasi	492.605 492.175	455.184 444.409	412.889 396.179	355.000 338.289	297.754 281.123
2	Mempertahankan kawasan hutan tetap seluas 1.069.997,78 Ha	Target Realisasi	1.069.997,78 1.069.997,78	1.069.997,78 1.069.997,78	1.069.997,78 1.071.722,83	1.071.722,83 1.071.722,83	1.071.722,83 1.071.722,83
3	Operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), 3 Unit	Target Realisasi	1 1	3 8	3 8	3 12	3 12
4	Membentuk Model Konservasi Keanekaragaman Hayati Daerah (MKKHD), 3 lokasi	Target Realisasi	0 0	1 1	3 3	3 3	3 4

Sumber : Hasil Analisis

Dari tabel tersebut diatas, menunjukkan bahwa kondisi awal **lahan kritis** prov. NTB (tahun 2008 seluas 507.778,17 ha). Dari hasil kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan yang dilakukan oleh instansi bidang kehutanan (Dinas Kehutanan Prov. NTB, Dinas Kehutanan Kab/Kota dan UPT Kementerian Kehutanan), LSM bidang Kehutanan, Masyarakat, Swasta dan anak-anak sekolah dari tahun ke tahun menunjukkan adanya penurunan luas lahan kritis, sehingga tahun 2013 lahan kritis prov NTB seluas 272.697 ha (data luas lahan kritis berdasarkan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan). Upaya-upaya yang dilakukan adalah dengan merehabilitasi hutan dan lahan dengan berbagai kegiatan seperti rehabilitasi sumber mata air, reboisasi pengayaan tanaman, bantuan bibit

tanaman penghijauan, bibit bakti sosial, bantuan bibit melalui penguatan kelembagaan Ponpes, bibit di persemaian permanen dan pola konvensional, kebun bibit rakyat, khususnya ditanam pada lahan kritis yang terdapat di seluruh wilayah Kab/Kota se- NTB.

Kondisi awal luas hutan Prov NTB (tahun 2008 seluas 1.069.997,78 ha). Berbagai kegiatan yang dilakukan untuk mempertahankan kawasan hutan agar tidak keluar dari fungsinya, seperti operasi gabungan, operasi intelijen, sosialisasi, pembinaan dan pertemuan dengan masyarakat sekitar hutan. Namun capaian ini tidak terlepas dari peran serta masyarakat dalam mendukung program-program pembangunan kehutanan melalui kesadaran dalam mempertahankan kawasan hutan dengan menjaga dan mengelola hutan secara lestari. Sehingga tahun 2013 terjadi perubahan luas kawasan hutan menjadi 1.071.722,83 ha (ada penambahan seluas 1.725,05 yaitu di KH. Gn Tunak (seluas 905,85 ha) dan KH. Danau Taliwang (seluas 819,20 ha).

Kesatuan Pengelolaan Hutan merupakan pengelolaan hutan secara lestari sesuai fungsinya di tingkat tapak, kondisi awal KPH Lintas Kab/Kota (tahun 2008, belum ada KPH yang operasional), Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target tersebut antara lain : mengadakan pertemuan dengan berbagai stakeholder, pembinaan dengan kelompok tani hutan di sekitar KPH dalam rangka penguatan kelembagaan, sosialisasi dsb. Pada tahun 2013 prov NTB sudah memiliki 12 unit KPH (termasuk KPH Kab/Kota yang menjadi tanggungjawab pemerintah Kab/Kota). Namun capaian ini tidak terlepas dari peran serta masyarakat disekitar hutan dalam mendukung pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

Model Konservasi Keanekaragaman Hayati Daerah (MKKHD), kondisi awal RPJM (tahun 2008, belum ada terbentuk MKKHD). MKKHD merupakan kawasan ekosistem dengan karakteristik khas, yang perlu dilakukan pengawetan karena menyangkut perwakilan tipe ekosistem setempat, dilakukan perlindungan dengan menekan gangguan, rehabilitasi dan restorasi kawasan serta mengembangkan pemanfaatan yang mempertimbangkan kelestarian. Pada tahun 2013 capaian MKKHD sebanyak 4 lokasi yaitu MKKHD Tatar Sepang, MKKHD Tambora, MKKHD

Parado dan ODTW Gunung Sasak. Upaya-upaya yang dilakukan untuk membentuk MKKHD yaitu dengan pertemuan-pertemuan kelompok dalam rangka penguatan kelembagaan serta tidak terlepas dari keikutsertaan masyarakat dalam mendukung program-program pembangunan kehutanan.

c. Energi dan Sumber Daya Mineral

Selama kurun waktu 2009-2012, telah terbangun PLTS dan PLT Accu sebanyak 4,105 unit yang tersebar di 32 Desa pada 8 Kabupaten dengan total daya 208.250 watt, 8 unit PLTMH dengan total kapasitas 460 KW di 6 desa pada 6 kabupaten. Pada tahun 2012 NTB memperoleh bantuan dari Kementerian ESDM untuk pembangunan PLTS Komunal dan PLT Hybrid dengan total daya 1090 KW di 7 desa pada 5 kabupaten. Khusus untuk mendukung program konversi energi terutama untuk keperluan rumah tangga, selama kurun waktu 2011-2012 pemerintah NTB bekerjasama dengan HIVOS Biru telah membangun 1192 unit digester biogas yang dimanfaatkan masyarakat untuk keperluan memasak. Berbagai upaya ini telah meningkatkan ratio elektrifikasi dari 39,96% pada tahun 2009 menjadi 53,88% pada tahun 2012. Seluruh upaya tersebut mempengaruhi rasio elektrifikasi sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.78
Rasio Elektrifikasi NTB Tahun 2013

Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga (RT)	RT Berlistrik Non PLN	RT Berlistrik PLN	Rasio Elektrifikasi (%)
2	3	4	5	6= (4+5/3)x100
Kota Mataram	117.103		114.855	98,08
Kab. Lombok Utara	57.305	1.470	34.644	63,02
Kab. Lombok Barat	177.967	1.188	88.552	50,43
Kab. Lombok Tengah	264.956	2.937	151.175	58,17
Kab. Lombok Timur	332.808	2.261	202.729	61,59
Kab. Sumbawa Barat	31.785	867	21.644	70,82
Kab. Sumbawa	111.547	2.096	78.994	72,70
Kab. Dompu	55.464	742	36.544	67,23
Kab. Bima	113.890	1.760	70.147	63,14
Kota Bima	37.848		25.381	67,06
Total	1.300.673	13.321	824.665	64,43

Sumber : Hasil Analisis

d. Pariwisata (PTRP)

Nusa Tenggara Barat khususnya Pulau Lombok termasuk dalam lima besar daerah tujuan wisata di Indonesia. Kunjungan wisatawan pada tahun 2008 sebanyak 544.501 orang meningkat menjadi 1.163.142 orang pada tahun 2012 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.79
Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Nusantara
Tahun 2008 – 2012

Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
Angka Kunjungan Wisatawan (orang)	544,501	619,370	725,388	886,880	1,163.142
- Wisatawan Mancanegara	213,926	232,525	282,161	364,196	471,706
- Wisatawan Nusantara	330,575	386,845	443,227	522,684	691,436

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi NTB, 2012

e. Kelautan dan Perikanan

Program unggulan di sektor kelautan dan perikanan adalah rumput laut. Pengembangan 10 kawasan minapolitan rumput laut berdampak pada peningkatan produksi sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.80
Produksi Rumput Laut pada 10 Kawasan Minapolitan
Tahun 2009-2012

No.	Kawasan	Produksi (Ton)				Peningkatan Pertahun (%)
		2009	2010	2011	2012	
1.	Pengantap	21.137,53	22.164,46	22.126,56	36.495,10	23,21
2.	Gerupuk	13.300,00	10.228,51	8.266,99	15.530,00	15,19
3.	Awang	10.279,00	16.771,49	9.784,00	12.679,19	17,03
4.	Teluk Ekas	25.000,00	30.561,50	59.108,00	52.050,00	34,57
5.	Serewe	35.471,00	62.507,50	31.381,94	63.234,50	42,64
6.	Kertasari	7.620,00	10.633,00	35.910,00	49.088,21	104,65
7.	Lab. Mapin	2.000,00	11.332,84	97.534,32	93.234,39	407,62
8.	Terano	25.056,00	27.815,16	135.924,04	221.846,17	154,30
9.	Kwangko	1.100,17	16.000,00	18.503,00	54.940,03	522,30
10.	Waworada	6.286,80	13.032,26	39.375,60	58.602,64	119,42
Jumlah		147.250,50	221.046,72	457.914,45	657.700,23	66,97

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB Tahun 2012

f. Perdagangan

Pada tahun 2008, kontribusi sektor perdagangan sebesar 13,10 %, meningkat menjadi 16,76% pada tahun 2012. Volume dan nilai ekspor perdagangan Provinsi NTB tahun 2008 mencapai 406.750.149 ton dengan nilai mencapai 760.354.616,842 US Dollar. Volume ekspor menunjukkan peningkatan sampai Tahun 2010 dan kondisi sampai dengan tahun 2012 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.81
Volume Dan Nilai Ekspor Perdagangan Provinsi NTB
Tahun 2008-2012

Tahun	Volume (ton)	Nilai (US Dollar)
2008	406.750,149	760.354.616,842
2009	648.652,850	1.256.768.889,398
2010	776.364,628	1.998.460.764,912
2011	388.125,375	1.136.099.286,824
2012	321.068,317	586.189.585,321

g. Industri

Tingkat pertumbuhan industri di Provinsi Nusa Tenggara Barat menunjukkan kondisi fluktuatif, pada tahun 2008 pertumbuhan sebesar 1,5 persen, tahun 2009 mengalami penurunan menjadi 0,97 persen, tahun 2010 mengalami peningkatan menjadi 1,2 persen dan pada tahun selanjutnya stabil. Kinerja sektor industri di Provinsi NTB tahun 2008-2012 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.82
Kontribusi industri Tahun 2008-2012

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1	Konsumsi Rumah tangga perkapita (dalam rupiah)	372.466	391.025	423.472	449.901	557.099
2	Nilai tukar petani	98,83	96,45	95,32	96,14	95,32
3	persentase konsumsi rumah tangga non pangan	45,47	40,88	39,72	44,18	43,28
4	produktivitas total daerah (dalam juta)	35.314.731	44.014.619	49.631.649	48.824.931	49.529.381
5	pertanian	8.319.378	9.117.556	10.038.756	11.354.297	12.725.514
6	pertambangan dan penggalan	10.870.787	15.851.362	18.066.479	12.927.229	9.228.512

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
7	industri pengolahan	1.279.191	1.491.345	1.638.225	1.758.209	1.936.295
8	listrik	153.889	178.450	205.175	227.609	252.860
9	bangunan	2.299.100	2.854.410	3.199.220	3.637.140	4.092.610
10	perdagangan	4.625.844	5.411.537	6.258.742	7.208.769	8.302.153
11	pengangkutan dan komunikasi	2.772.461	3.027.482	3.269.754	3.563.605	3.808.385
12	keuangan	1.590.725	1.878.885	2.159.718	2.462.418	2.873.319
13	jasa	3.403.357	4.203.592	4.795.579	5.685.656	6.309.732

Sumber : Hasil Analisis

h. Ketransmigrasian

Selama periode 2009-2012, daerah tujuan transmigrasi asal provinsi NTB sebanyak 6 Provinsi yaitu : Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Maluku Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara. Jumlah Transmigrasi Keluar Provinsi pada tahun 2009, sedangkan pada tahun 2012 sebanyak 79 KK, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.83
Perkembangan Jumlah Transmigrasi Keluar Provinsi menurut Daerah Tujuan,
Asal Transmigrasi Periode Tahun 2009-2012

NO	DAERAH TUJUAN	2009		2010		2011		2012	
		DAERAH ASAL	JML (KK)	DAERAH ASAL	JML (KK)	DAERAH ASAL	JML (KK)	DAERAH ASAL	JML (KK)
1	Kalimantan Selatan	KLU	10	-	-	-	-	-	-
2	Kalimantan Barat	-	-	Mataram	5	Mataram	10	KLU	14
		-	-	Lobar	3	Lobar	5	-	-
		-	-	Loteng	5	Loteng	5	-	-
		-	-	Lotim	5	KLU	5	-	-
		-	-	KLU	7	-	-	-	-
3	Maluku Utara	Mataram	5	-	-	-	-	-	-
		Lobar	9	-	-	-	-	-	-
		Loteng	5	-	-	-	-	-	-
		Lotim	6	-	-	-	-	-	-
4	Gorontalo	Mataram	1	Loteng	18	-	-	-	-
		Lobar	4	Lotim	7	-	-	-	-
5	Sulawesi Tenggara	-	-	Mataram	5	Mataram	3	-	-
		-	-	Lobar	5	Lobar	10	-	-
		-	-	Loteng	5	Lotim	37	-	-
		-	-	Lotim	5	-	-	-	-
		-	-	KLU	5	-	-	-	-
6	Sulawesi Barat	-	-	-	-	Mataram	2	-	-
		-	-	-	-	Lobar	5	-	-
		-	-	-	-	KLU	18	-	-
		JUMLAH	40	JUMLAH	75	JUMLAH	100	JUMLAH	14

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, 2012

Jumlah transmigrasi dalam Provinsi pada tahun 2009 sebanyak 100 KK dan pada tahun 2012 sebanyak 75 KK, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.84
Perkembangan Jumlah Transmigrasi Dalam Provinsi menurut
Kabupaten Tujuan, Kabupaten Asal Transmigran
Tahun 2009-2012

NO	DAERAH TUJUAN	2009		2010		2011		2012	
		DAERAH ASAL	JML (KK)	DAERAH ASAL	JML (KK)	DAERAH ASAL	JML (KK)	DAERAH ASAL	JML (KK)
1	Kabupaten Bima	Mataram	11	-	-	-	-	Mataram	15
		Lobar	12	-	-	-	-	Lobar	15
		Loteng	15	-	-	-	-	Loteng	15
		Lotim	12	-	-	-	-	Lotim	15
		-	-	-	-	-	-	KLU	15
2	Kabupaten Sumbawa Barat	Mataram	11	Mataram	9	-	-	-	-
		Lobar	12	Lobar	9	-	-	-	-
		Loteng	15	Loteng	14	-	-	-	-
		Lotim	12	Lotim	9	-	-	-	-
		-	-	KLU	9	-	-	-	-
4	Kabupaten Dompu	-	-	Mataram	9	-	-	-	-
		-	-	Lobar	9	-	-	-	-
		-	-	Loteng	14	-	-	-	-
		-	-	Lotim	9	-	-	-	-
		-	-	KLU	9	-	-	-	-
		JUMLAH	100	JUMLAH	100	JUMLAH	0	JUMLAH	75

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, 2012

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

a. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita

Perkembangan konsumsi rumah tangga perkapita mengalami peningkatan dari tahun 2008 sebesar Rp 372.466 menjadi Rp. 557.099 pada tahun 2012, tumbuh sebesar 149,57 persen. Konsumsi rumah tangga non pangan mengalami pergerakan yang fluktuatif, dimana capaian tahun 2008 sebesar 45,47 persen dan turun pada tahun 2012 menjadi 43,28 persen.

b. Nilai tukar petani

Nilai tukar petani mengalami penurunan dari tahun 2008 sebesar 98,83 persen, turun menjadi 95,32 persen.

c. Fasilitas listrik

Ketersediaan Listrik di Provinsi NTB pada tahun 2013 sebesar 378,65 megaWatt dengan daya terpasang 499,89 megaWatt meningkat dari tahun 2010 sebesar 182,29 megaWatt dengan daya terpasang 172,14 megaWatt.

2.4.2. Fokus iklim berinvestasi

a. Keamanan dan ketertiban

Untuk meningkatkan daya saing daerah faktor keamanan adalah hal yang penting. Tingkat kriminalitas masih fluktuatif dari waktu ke waktu, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.85
Rekapitulasi Kriminalitas di Provinsi NTB Tahun 2008-2012

Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
Crime Total	7.821	9.415	11.393	11.454	11.186
Crime Cleardel	4.668	4.823	5.551	6.082	6.215
Clearence Rate	59,69	51,22	43,80	53,10	55,56
Crime Rate	115	215	223	199	238,8
Crime Clock	1 ⁰ 07'12"	0 ⁰ 6'0"	0 ⁰ 48'0"	1 ⁰ 30'25"	0 ⁰ 46'99"

Sumber: Kepolisian Daerah NTB

b. Angka Kriminalitas

Total kejahatan 7.821 kasus pada tahun 2008 menjadi sebanyak 11.186 kasus tahun 2012. Pada tahun 2008 kejahatan yang timbul setiap 1⁰07'12" menjadi 0⁰46'99" pada tahun 2012. Kasus kejahatan yang dapat diselesaikan mengalami peningkatan diakhir tahun 2012 menjadi 6.215 kasus dari kondisi 2008 sebanyak 4.668 kasus, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.86
Rekapitulasi Kriminalitas di Provinsi NTB Tahun 2008-2012

URAIAN	2008	2009	2010	2011	2012
Crime Total	7.821	9.415	11.393	11.454	11.186
Crime Cleardel	4.668	4.823	5.551	6.082	6.215
Clearence Rate	59,69	51,22	43,80	53,10	55,56

URAIAN	2008	2009	2010	2011	2012
Crime Rate	115	215	223	199	238,8
Crime Clock	1 ⁰ 07'12"	0 ⁰ 6'0"	0 ⁰ 48'0"	1°30'25"	0 ⁰ 46'99"

Sumber: Kepolisian Daerah NTB

Jenis kejahatan didominasi oleh kasus pencurian kendaraan bermotor dan pencurian dengan pemberatan. Kasus yang mengalami penurunan sejak tahun 2008-2011 adalah kasus penganiayaan berat, perkosaan, maupun illegal logging, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.87
Rekapitulasi Kriminalitas menurut Kasus Tahun 2008-2012

No	KASUS	2008	2009	2010	2011	2012
1	Pencurian dengan Pemberatan	1.048	566	565	1.122	974
2	Pencurian dengan Kekerasan	254	76	198	394	422
3	Pencurian Kendaraan Bermotor	568	320	283	1.840	2.692
4	Penganiayaan Berat	119	118	187	98	97
5	Judi	516	72	117	176	189
6	Narkotika	199	10	10	158	163
7	Pembunuhan	17	40	27	7	24
8	Kebakaran	101	13	12	63	46
9	Perkosaan	214	46	93	85	53
10	Uang Palsu	17	9	-	8	13
11	<i>Illegal Logging</i>	193	26	152	53	45
12	Senpi/handak	9	11	20	19	5
J U M L A H		2.745	3.244	4.054	4.023	4.723

Sumber: Kepolisian Daerah NTB